

BAB EMPAT

ANALISIS DAYA SAING

4.1. ANALISIS DAYA SAING

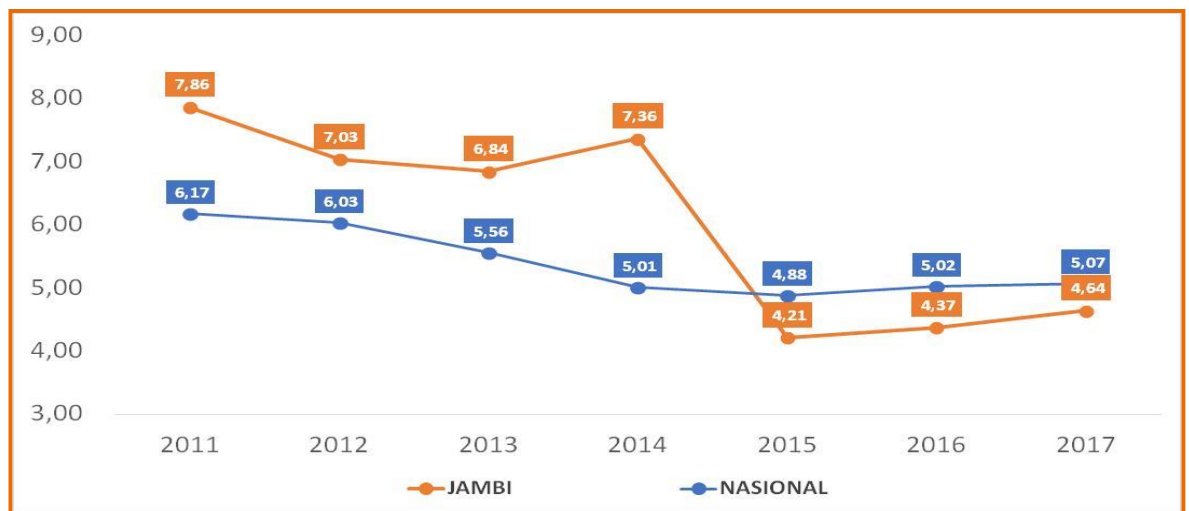
Berdasarkan perencanaan pembangunan pemerintah, salah satu sasaran pembangunan yang dicantumkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari tuntutan jaman pada era globalisasi yang tidak akan lepas dari persaingan pada setiap bidang kehidupan. Berlandaskan hal tersebut, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu menyesuaikan diri pada iklim tersebut sehingga secara nasional dapat tercipta daya saing yang kompetitif.

Pada pelaksanaannya, pembangunan daerah semakin dinamis, berdasar hal itu tentu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi yang terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan daerah juga diarahkan agar terciptanya kemandirian daerah, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.1. Tinjauan Umum

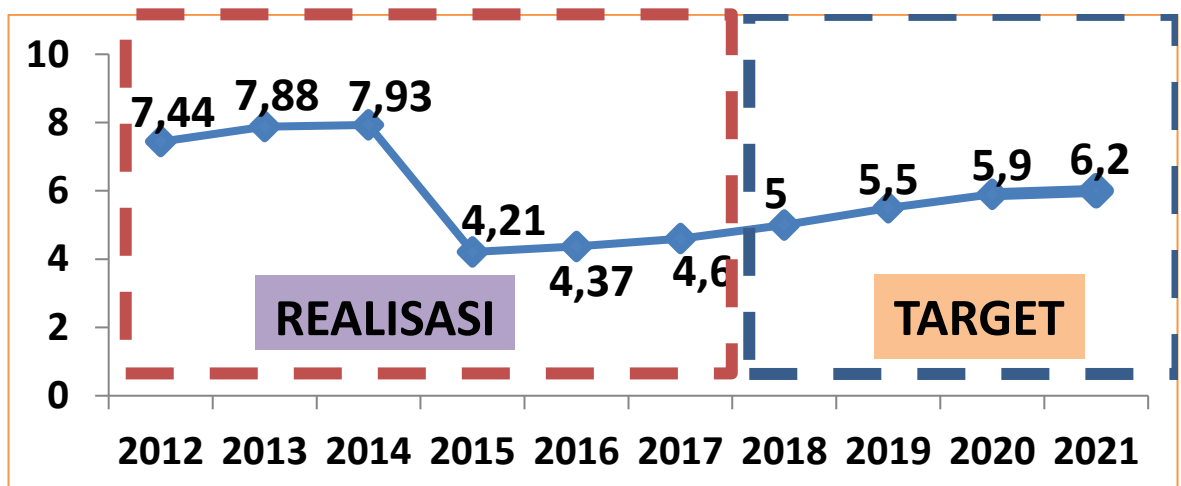
Secara rata-rata kinerja perekonomian Provinsi Jambi selama tahun 2011-2014 cukup baik. Hal tersebut tercermin dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi

yaitu 7,27 persen yang lebih tinggi dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,69 persen. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jambi mengalami perlambatan, bahkan nilai tersebut berada di bawah angka 5 persen dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:



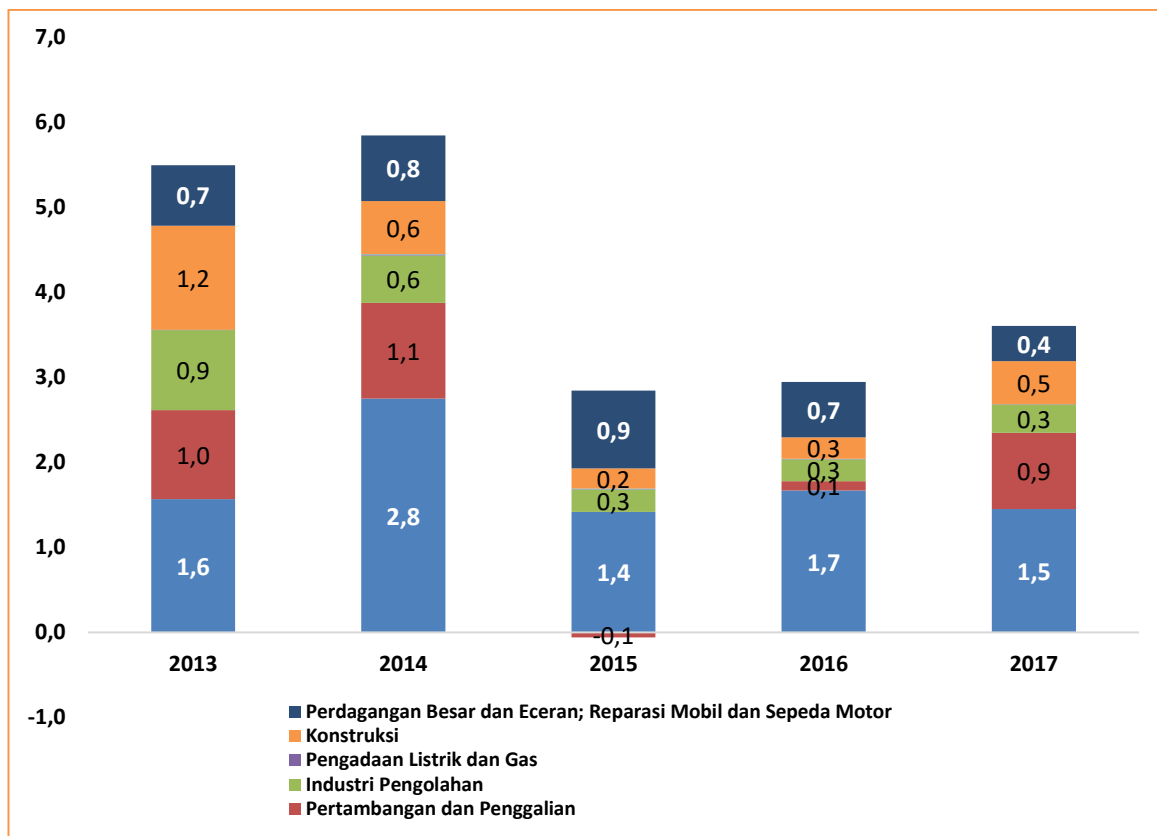
Gambar 4.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2017
Sumber: Bappenas (2018)

Berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2015-2017, kemudian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2021 mengalami perubahan target dengan nilai rata-rata yaitu 5,65 persen. Perubahan tersebut terjadi dengan menyesuaikan terhadap perubahan asumsi-asumsi makro di tingkat pemerintah pusat sekaligus sebagai bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.



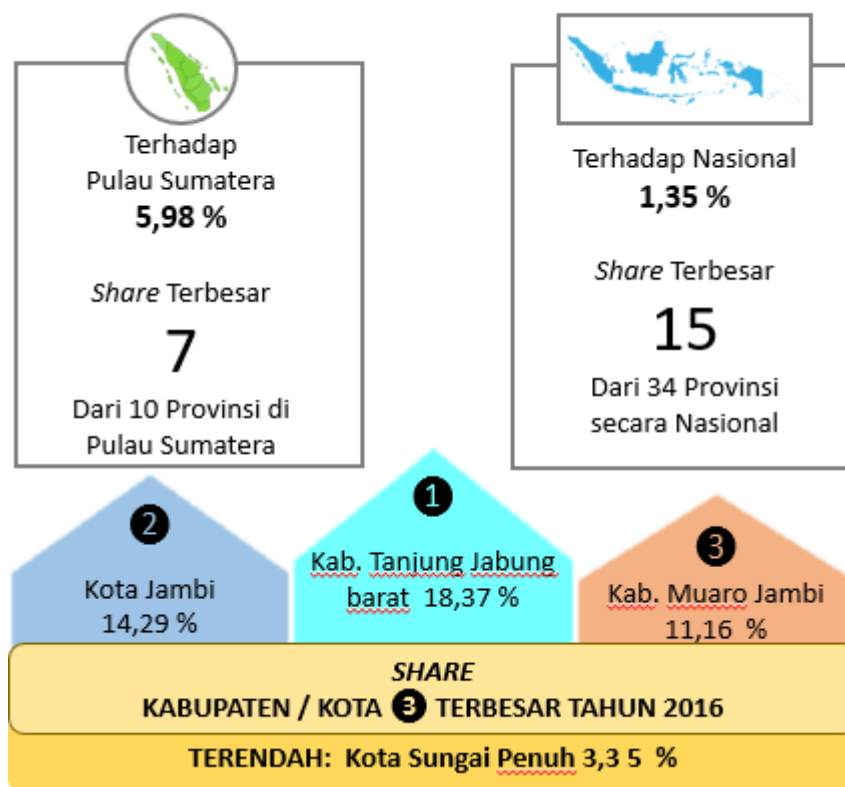
Gambar 4.2.
Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2021
 Sumber: BPS Provinsi Jambi (2018), dan RJMD Provinsi Jambi

Adapun pertumbuhan yang terjadi di Jambi didorong oleh 5 sektor utama antara lain sektor pertanian, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang nilai pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,8 persen disusul sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,7 persen. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai rata-rata pertumbuhan 0,6 persen, dan sektor konstruksi menyumbang pertumbuhan sebesar 0,56 persen.



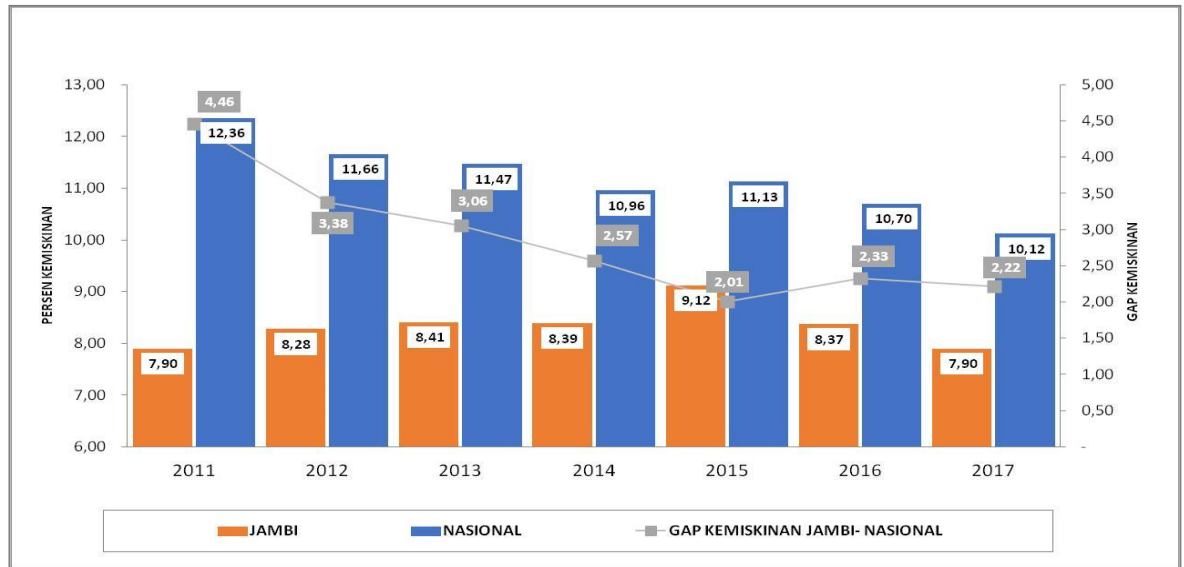
Gambar 4.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
dengan Pendekatan Produksi Tahun 2013-2017
Sumber: Bappenas (2018)

Jika dilihat berdasarkan aspek wilayah, Provinsi Jambi memiliki kontribusi ekonomi sebesar 5,98 persen terhadap total output yang diproduksi di Pulau Sumatera. Angka tersebut termasuk kedalam peringkat 7 terbesar dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Jika dilihat secara nasional, Jambi berkontribusi terhadap 1,35 persen terhadap total output yang diproduksi. Hal tersebut menjadikan Jambi sebagai provinsi dengan *share* terbesar ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap penciptaan output ekonomi di Provinsi Jambi terbesar antara lain Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muara Jambi dengan presentase masing-masing adalah 14,29 persen, 18,37 persen dan 11,16 persen. Sedangkan kabupaten dengan kontribusi output terendah ialah Kota Sungai Penuh yang hanya 3,35 persen.

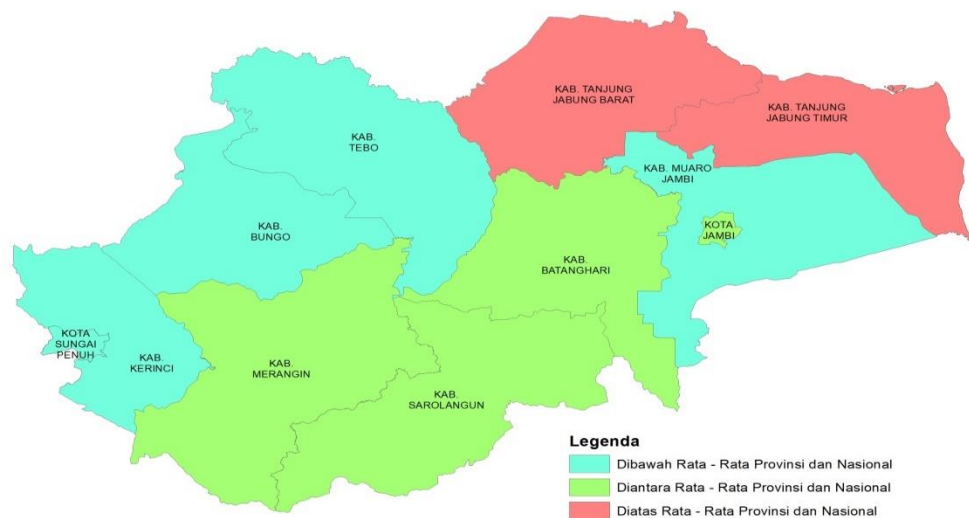


Gambar 4.4.
Rata-rata *Share* Provinsi Jambi Tahun 2011-2017
Sumber: Bappenas (2018)

Di sisi lain, indikator kemiskinan di Jambi makin membaik yang ditunjukkan dari angka kemiskinan provinsi yang terus menurun selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut sejalan dengan tren penurunan angka kemiskinan nasional dari tahun 2010 hingga 2017. Adapun wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari. Dari ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding kemiskinan tingkat provinsi dan nasional yaitu masing-masing 11,32 persen dan 12,58 persen. Hal tersebut berbeda dengan Kabupaten Batang Hari yang memiliki tingkat kemiskinan diantara tingkat provinsi dan nasional yaitu 10,33 persen.



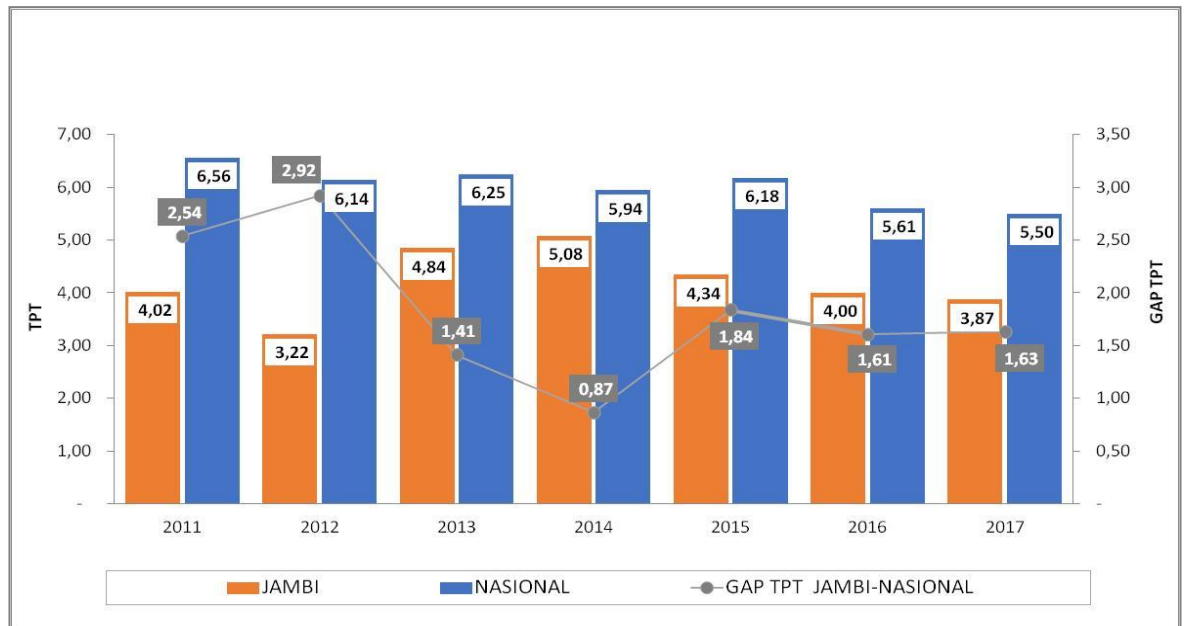
Gambar 4.5.
Perkembangan Angka Kemiskinan Provinsi Jambi, Nasional dan Gap antara
Jambi-Nasional Tahun 2011-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 4.6.
Pola Spasial Angka Kemiskinan 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

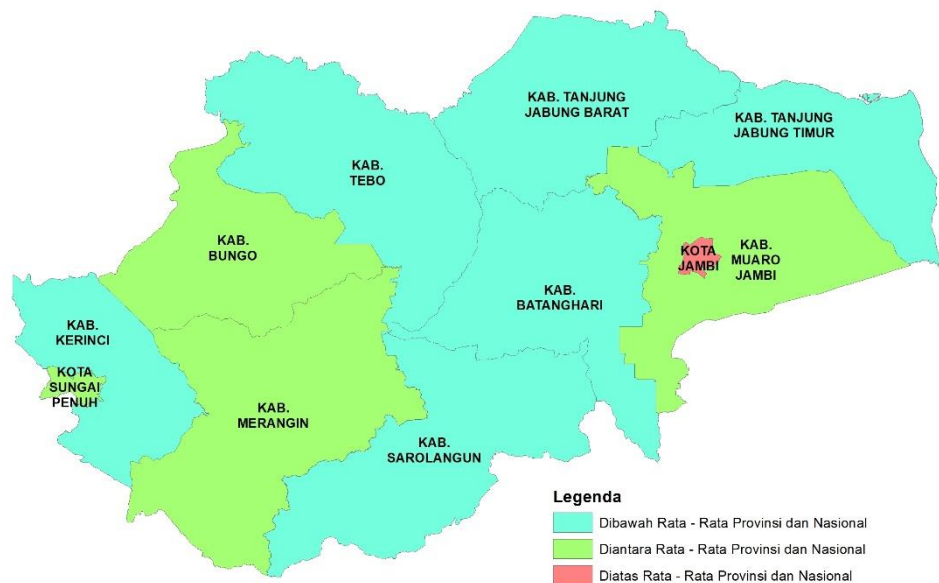
Jika dilihat dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui bahwa Provinsi Jambi telah mengalami perbaikan dengan nilai TPT

yang terus menurun selama 4 tahun terakhir, dan masih dibawah rata-rata nasional, dengan rata-rata gap sekitar 1,6%.



Gambar 4.7.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Jambi, Nasional dan Gap Jambi-Nasional Tahun 2011-2017
Sumber: BPS (diolah)

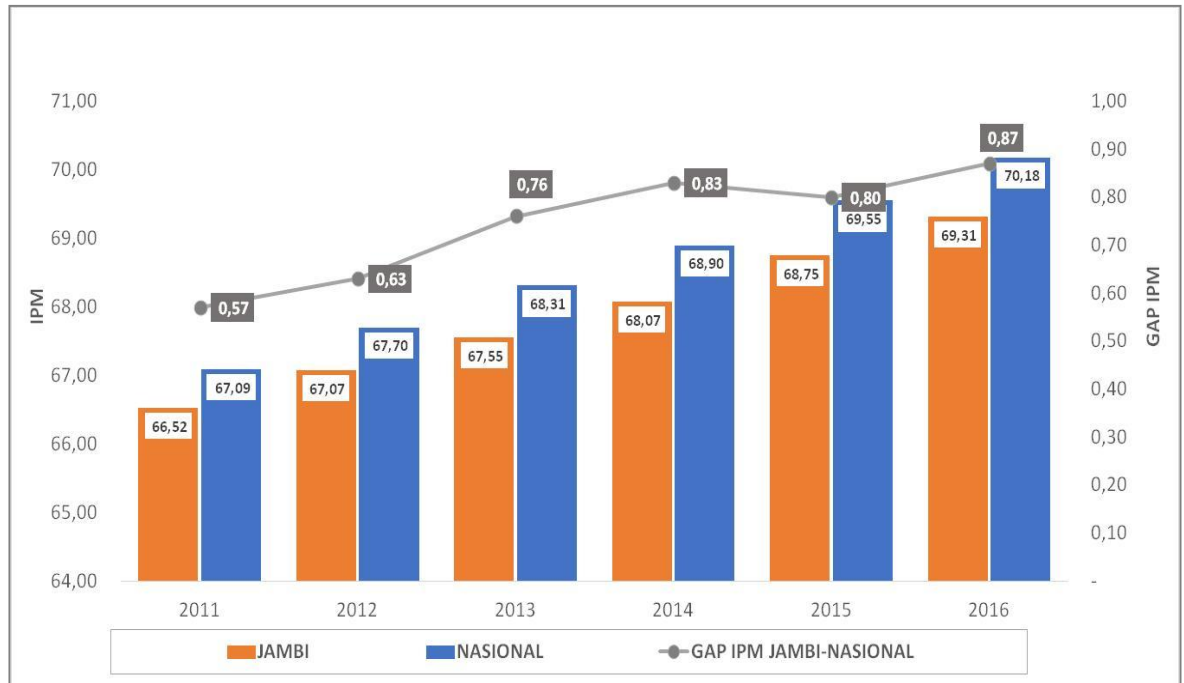
Secara umum, TPT provinsi Jambi dan nasional mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir, dan gap antara TPT provinsi Jambi dan nasional mengalami fluktuatif. Jika dilihat secara spasial, terdapat tiga kabupaten dan atau dua kota yang memiliki TPT terbesar di Jambi. Kota Jambi termasuk ke dalam wilayah yang memiliki pengangguran terbuka yang paling banyak yaitu 5,55%. Minimnya ketersediaan lapangan kerja terdidik dan rendahnya keterampilan tenaga kerja sebagai penyebab pengangguran terkonsentrasi di Kota Jambi. Wilayah lain yang juga termasuk wilayah dengan pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo dengan nilai TPT masing-masing 5,39 persen dan 4,89 persen. Angka-angka tersebut berada di antara rata-rata provinsi dan nasional.



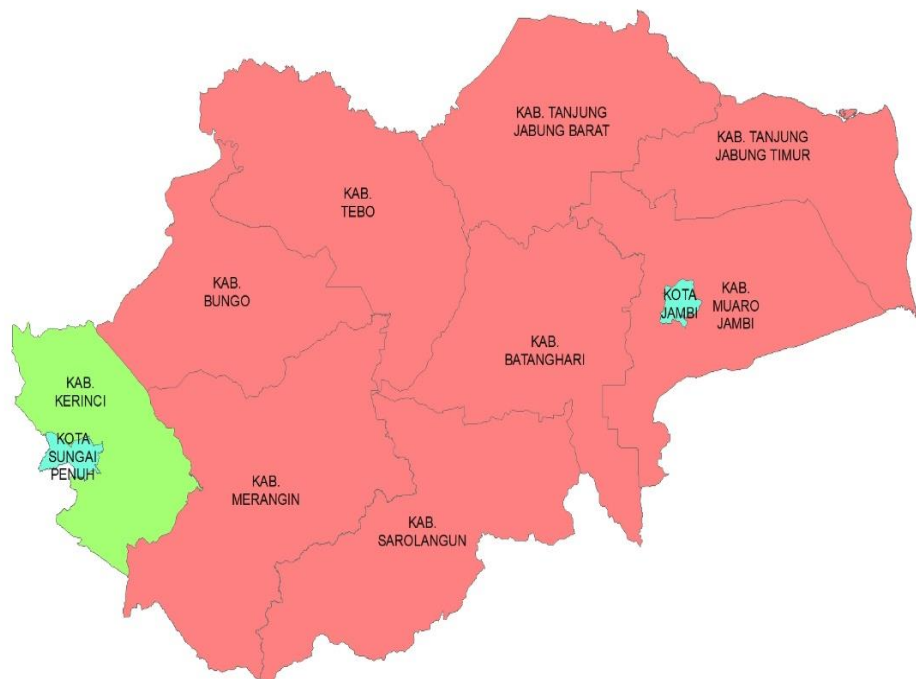
Gambar 4.8.
Pola Spasial TPT 2017
Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan indikator pembangunan manusia, Provinsi Jambi memiliki nilai indeks pembangunan manusia yang membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada indeks pembangunan manusia dalam ruang lingkup nasional. Meskipun demikian, gap IPM antara Provinsi Jambi terhadap nasional semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pembangunan yang terjadi di Jambi memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibanding perbaikan pembangunan manusia tingkat nasional.

Jika ditinjau secara spasial, IPM tertinggi diperoleh Kota Jambi dengan angka 76,14. Adapun tiga wilayah dengan nilai IPM terendah ialah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo dengan nilai masing-masing 65,91; 61,88 dan 68,05.

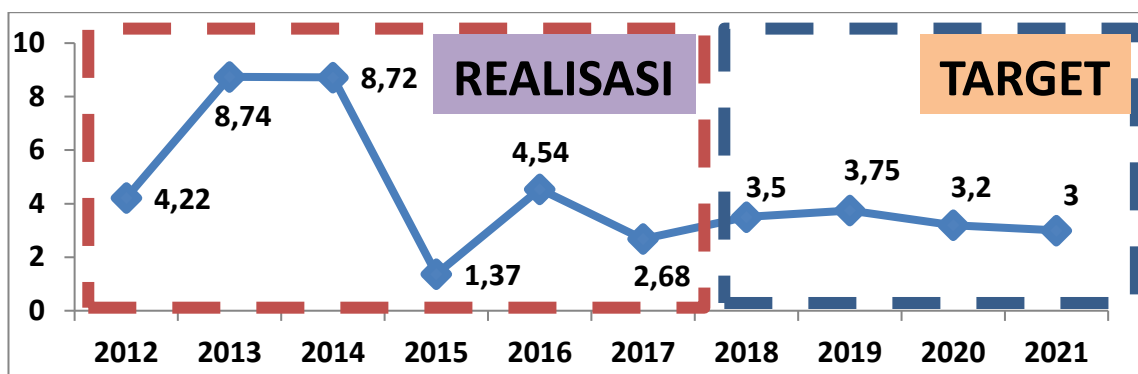


Gambar 4.9.
Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2016
Sumber: BPS (2018)



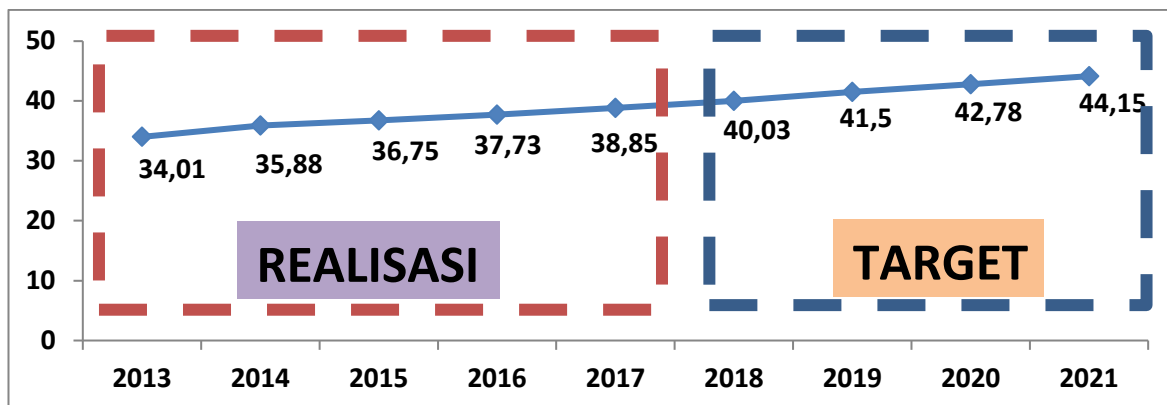
Gambar 4.10
Pola Spasial IPM Tahun 2016
Sumber: BPS (2018)

Selanjutnya tingkat inflasi di Jambi tergolong fluktuatif dari tahun 2012 hingga 2017. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai inflasi sebesar 8,74 persen, sedangkan inflasi terendah yaitu 1,37 persen pada tahun 2015. Dengan menggunakan proyeksi inflasi yang telah disesuaikan, maka target inflasi hingga 2021 diproyeksikan berada pada kisaran 3 hingga 3,75 persen per tahun.



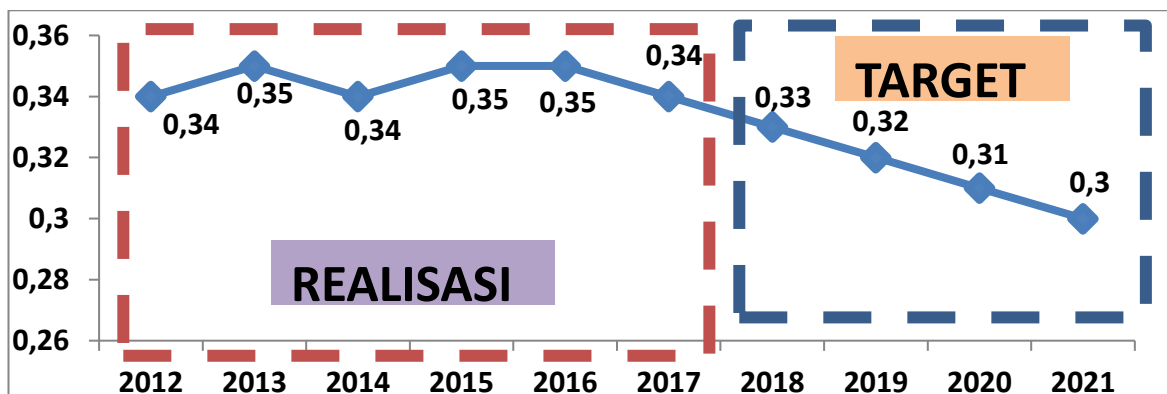
Gambar 4.11.
Perkembangan Inflasi dan Target Tahun 2012-2021
Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

Berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Provinsi Jambi memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai PDRB per kapita yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi menjadi optimis untuk menetapkan peningkatan target PDRB perkapita dari tahun 2018-2021. Hal ini sebagai indikasi bahwa tingkat kemakmuran masyarakat di Provinsi Jambi semakin lebih baik.



Gambar 4.12.
Perkembangan PDRB Perkapita dan Target (dalam juta rupiah)
Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

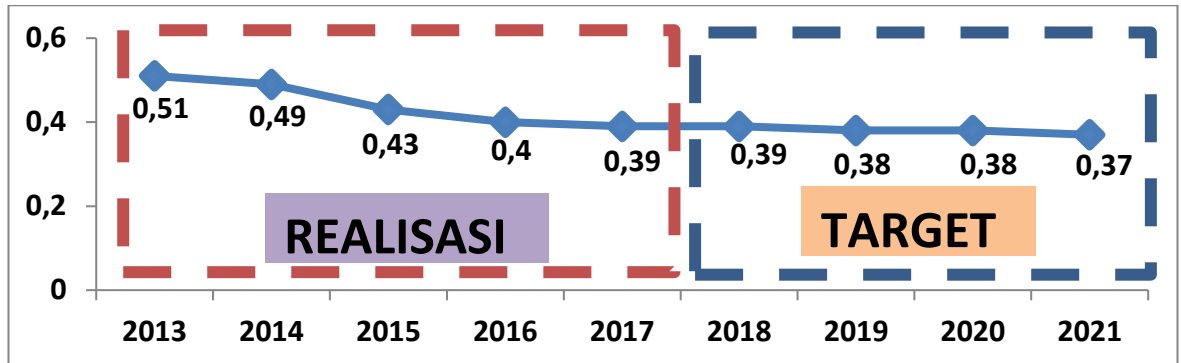
Untuk mengetahui ketimpangan yang ada di Provinsi Jambi, dapat dilihat menggunakan Indeks Gini. Dari tahun 2012 – 2017, nilai indeks gini mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada pada level yang rendah karena indeks gini lebih kecil dari angka 0,4. Oleh karena itu, target pada tahun 2018 – 2021 diharapkan ketimpangan dapat terus menurun secara perlahan dari tahun ke tahun.



Gambar 4.13.
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2012-2021
Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

Selain melihat ketimpangan pendapatan, dapat juga diketahui ketimpangan antar daerah. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari Indeks Williamson. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai indeks Williamson

menunjukkan angka yang semakin menurun. Angka tersebut menjadi acuan proyeksi turunnya Indeks Williamson pada periode yang akan datang (2018-2021) yang berarti ketimpangan makin mengecil antar daerah.



Gambar 4.14.
Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2013-2021
Sumber: RPJMD Provinsi Jambi

4.1.2. Daya Saing Provinsi Jambi dan Provinsi Lainnya di Indonesia

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel dengan indikator Input dan Output. Variabel dengan indikator input meliputi lingkungan usaha produktif, perekonomian daerah, sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel indikator output yang terdiri dari produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, PDRB per kapita, dan Indeks pembangunan manusia di semua Provinsi di Indonesia dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi.

(1) Daya Saing Input

Indikator input adalah indikator dalam piramida daya saing daerah yang bersifat *endowment* maupun yang diakibatkan oleh adanya interaksi aktivitas kegiatan masyarakatnya. Faktor pembentuk daya saing input pembentuk daya

saing daerah Provinsi di Indonesia terdiri dari empat indikator utama, yaitu lingkungan usaha produktif, perekonomian daerah, sumber daya manusia, dan infrastruktur dan sumber daya alam.

Lingkungan usaha produktif merupakan indikator dasar sebagai prasarat dalam menumbuhkan daya saing daerah. Indikator yang umumnya dipakai untuk menunjukkan lingkungan usaha produktif adalah adalah Angka Melek Kuruf (AMH) % (LUP1), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % (LUP2), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % (LUP3), Tingkat kemiskinan % (LUP4), dan Kepadatan penduduk jiwa/km² (LUP5). Hasil perhitungan analisis pembentuk daya saing input dengan indikator lingkungan usaha produktif dapat di lihat pada Tabel 4.1.

Pada kenyataannya, Provinsi Jambi hanya berada di peringkat ke-19 untuk analisis daya saing input berdasarkan indikator lingkungan usaha produktif dengan skor sebesar 0.901, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewaliki indikator lingkungan usaha produktif, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel LUP2 (peringkat ke-9), LUP1 (peringkat ke-15), dan LUP4 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel LUP5 (peringkat ke-24) dan LUP3 (peringkat ke-19).

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing input lingkungan usaha produktif dengan skor 5.492. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Diposisi terakhir ditempati oleh Provinsi Papua dengan skor 0.535.

Di Pulau Sumatera, Provinsi yang memiliki daya saing tinggi (10 provinsi peringkat teratas) adalah Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-7) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Barat (peringkat ke-13), Riau (peringkat ke-16), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) adalah Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-25), Sumatera Selatan (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-28).

Tabel 4.1.
Tingkat Daya Saing Input Provinsi di Indonesia
Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif

No.	Provinsi	Lingkungan Usaha Produktif					LUP	Rangking
		LUP1	LUP2	LUP3	LUP4	LUP5		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.022	1.021	1.143	0.688	0.121	0.799	25
2	Sumatera Utara	1.034	1.007	1.092	1.180	0.268	0.916	17
3	Sumatera Barat	1.033	1.022	1.096	1.622	0.174	0.990	13
4	Riau	1.036	1.006	1.027	1.478	0.103	0.930	16
5	Jambi	1.025	1.020	0.977	1.386	0.096	0.901	19
6	Sumatera Selatan	1.029	1.007	0.962	0.836	0.124	0.792	27
7	Bengkulu	1.022	1.022	1.064	0.702	0.132	0.789	28
8	Lampung	1.012	1.026	0.961	0.840	0.329	0.833	22
9	Bangka Belitung	1.021	1.009	0.940	2.066	0.118	1.031	9
10	Kepulauan Riau	1.033	1.025	1.173	1.786	0.339	1.071	7
11	DKI. Jakarta	1.042	1.012	0.970	2.897	21.541	5.492	1
12	Jawa Barat	1.027	1.016	0.932	1.399	1.855	1.246	4
13	Jawa Tengah	0.976	1.006	0.964	0.895	1.448	1.058	8
14	D.I. Yogyakarta	0.989	1.029	1.135	0.886	1.650	1.138	5
15	Jawa Timur	0.958	1.013	1.002	0.978	1.143	1.019	10
16	Banten	1.020	1.011	0.943	1.959	1.738	1.334	3
17	Bali	0.971	0.996	1.179	2.645	1.009	1.360	2
18	Nusa Tenggara Barat	0.910	1.017	1.070	0.728	0.365	0.818	23
19	Nusa Tenggara Timur	0.957	0.989	0.869	0.512	0.148	0.695	33
20	Kalimantan Barat	0.966	1.001	0.830	1.393	0.046	0.847	21
21	Kalimantan Tengah	1.035	1.025	0.877	2.082	0.022	1.008	11
22	Kalimantan Selatan	1.028	1.020	0.931	2.330	0.145	1.091	6
23	Kalimantan Timur	1.033	1.010	1.111	1.801	0.038	0.999	12
24	Kalimantan Utara	0.994	0.958	1.029	1.573	0.013	0.913	18
25	Sulawesi Utara	1.043	0.979	1.023	1.386	0.245	0.935	15
26	Sulawesi Tengah	1.020	0.961	1.039	0.770	0.066	0.771	29
27	Sulawesi Selatan	0.957	1.010	0.975	1.155	0.256	0.871	20
28	Sulawesi Tenggara	0.985	1.001	1.022	0.915	0.093	0.803	24
29	Gorontalo	1.029	1.011	0.926	0.639	0.142	0.749	30
30	Sulawesi Barat	0.970	0.990	0.936	0.980	0.107	0.796	26
31	Maluku	1.035	0.990	1.037	0.599	0.051	0.742	31
32	Maluku Utara	1.032	1.005	1.035	1.700	0.051	0.965	14
33	Papua Barat	1.015	0.970	1.022	0.474	0.013	0.699	32
34	Papua	0.743	0.817	0.708	0.394	0.014	0.535	34

Sumber: Hasil pengolahan tim

Perekonomian daerah menunjukkan potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah dan merupakan pertimbangan penting dalam mendukung daya saing daerah. Dimensi yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian daerah meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triliun rupiah (PD1), Laju Pertumbuhan PDRB % (PD2), Realisasi PMDN miliar rupiah (PD3), Realisasi PMA juta dollar (PD4), Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliar rupiah (PD5),

Realisasi Pajak Daerah miliar rupiah (PD6).

Apabila dilihat dari indikator daya saing input dengan variabel perekonomian daerah, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 15 dengan skor 0.572, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari keenam variabel yang mewaliki indikator perekonomian daerah, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel PD4 (peringkat ke-12), dan PD3 (peringkat ke-15). Peringkat terendah pada variabel PD2 (peringkat ke-29), PD5 (peringkat ke-19), PD6 (peringkat ke-18), dan PD1 (peringkat ke-16). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah.

Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta kembali menempati urutan pertama dalam daya saing input perekonomian daerah dengan skor 6.257. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 0.219. Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan perbaikan perekonomian daerah untuk meningkatkan skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Gorontalo, Maluku, Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-6) dan Riau (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-11), Lampung (peringkat ke-14), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bangka Belitung (peringkat ke-31), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-28), dan Kepulauan Riau (peringkat ke-26).

Tabel 4.2.
Tingkat Daya Saing Input Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

No.	Provinsi	Perekonomian Daerah						PD	Rangking
		PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.417	0.618	0.101	0.024	0.537	0.368	0.344	28
2	Sumatera Utara	1.660	0.967	1.514	1.598	1.188	1.269	1.366	6
3	Sumatera Barat	0.530	0.982	0.197	0.205	0.493	0.434	0.473	23
4	Riau	1.643	0.416	1.404	1.119	0.901	0.849	1.055	7
5	Jambi	0.467	0.816	0.390	1.088	0.336	0.337	0.572	15
6	Sumatera Selatan	0.955	0.939	1.063	0.081	0.729	0.801	0.761	11
7	Bengkulu	0.143	0.990	0.038	1.247	0.218	0.183	0.470	24
8	Lampung	0.751	0.962	0.909	0.161	0.639	0.677	0.683	14
9	Bangka Belitung	0.171	0.767	0.225	0.146	0.164	0.158	0.272	31
10	Kepulauan Riau	0.583	0.939	0.181	0.127	0.266	0.283	0.397	26
11	DKI. Jakarta	5.510	1.092	6.125	4.846	10.005	9.965	6.257	1
12	Jawa Barat	4.566	1.059	4.975	5.424	3.985	4.310	4.053	2
13	Jawa Tengah	3.040	0.986	2.575	3.214	2.886	2.876	2.596	4
14	D.I. Yogyakarta	0.314	0.943	0.038	2.502	0.400	0.407	0.767	10
15	Jawa Timur	5.030	1.036	5.838	0.038	3.593	3.445	3.163	3
16	Banten	1.387	0.982	1.962	1.652	1.366	1.540	1.482	5
17	Bali	0.491	1.165	0.077	0.935	0.784	0.821	0.712	13
18	Nusa Tenggara Barat	0.338	1.087	0.702	0.139	0.362	0.317	0.491	21
19	Nusa Tenggara Timur	0.214	0.967	0.140	0.147	0.242	0.217	0.321	29
20	Kalimantan Barat	0.423	0.975	1.605	0.599	0.404	0.409	0.736	12
21	Kalimantan Tengah	0.300	1.188	0.394	0.676	0.320	0.308	0.531	18
22	Kalimantan Selatan	0.414	0.818	0.386	0.257	0.773	0.760	0.568	16
23	Kalimantan Timur	1.571	-0.071	1.423	1.355	0.962	0.858	1.016	8
24	Kalimantan Utara	0.183	0.700	0.111	0.157	0.077	0.088	0.219	34
25	Sulawesi Utara	0.268	1.152	0.193	0.509	0.260	0.257	0.440	25
26	Sulawesi Tengah	0.326	1.864	0.250	0.044	0.221	0.221	0.488	22
27	Sulawesi Selatan	0.964	1.384	0.255	1.630	0.898	0.937	1.011	9
28	Sulawesi Tenggara	0.278	1.216	0.408	0.752	0.179	0.178	0.502	20
29	Gorontalo	0.084	1.217	0.115	0.012	0.086	0.092	0.268	33
30	Sulawesi Barat	0.099	1.126	0.086	0.731	0.072	0.071	0.364	27
31	Maluku	0.094	1.076	0.007	0.224	0.125	0.095	0.270	32
32	Maluku Utara	0.077	1.077	0.149	0.241	0.117	0.103	0.294	30
33	Papua Barat	0.196	0.844	0.008	2.029	0.097	0.074	0.541	17
34	Papua	0.510	1.720	0.158	0.089	0.315	0.291	0.514	19

Sumber: Hasil pengolahan tim

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu negara/daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya manusia merupakan indikator yang penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Sumber daya manusia dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Faktor sumber daya manusia terdiri dari lima variabel, yaitu Rasio ketergantungan % (SDM1), Jumlah penduduk yang bekerja ribu jiwa (SDM2), Jumlah penduduk yang menganggur ribu jiwa (SDM3), Jumlah angkatan

kerja ribu jiwa (SDM4), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % (SDM5).

Apabila dilihat dari indikator daya saing input dengan variabel sumber daya manusia, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 17 dengan skor 1.216, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewaliki indikator sumber daya manusia, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel SDM1 (peringkat ke-9), SDM3 (peringkat ke-15), dan SDM5 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel SDM2 (peringkat ke-20), dan SDM4 (peringkat ke-20). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan *pro-job* agar dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga jumlah orang yang mendapat pekerjaan semakin tinggi.

Secara nasional, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dalam daya saing input sumber daya manusia dengan skor 2.763. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan skor 0.890. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membutuhkan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan skor daya saing input daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing sumber daya manusia adalah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta.

Di Pulau Sumatera, hanya terdapat satu provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bengkulu (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-18), Kepulauan Riau (peringkat ke-21), Sumatera Selatan (peringkat ke-22), dan Lampung (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-34), Riau (peringkat ke-33), dan Sumatera Barat (peringkat ke-32).

Tabel 4.3.
Tingkat Daya Saing Input Provinsi di Indonesia
Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

No	Provinsi	Sumber Daya Manusia					SDM	Rangking
		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.910	0.601	1.378	0.608	0.952	0.890	34
2	Sumatera Utara	0.882	1.788	0.549	1.790	1.029	1.208	18
3	Sumatera Barat	0.878	0.659	1.493	0.659	0.990	0.936	32
4	Riau	0.955	0.781	1.122	0.787	0.956	0.920	33
5	Jambi	1.048	0.466	3.099	0.458	1.009	1.216	17
6	Sumatera Selatan	0.987	1.108	1.143	1.095	1.038	1.074	22
7	Bengkulu	1.043	0.262	5.708	0.257	1.035	1.661	11
8	Lampung	0.987	1.095	1.175	1.081	1.013	1.070	23
9	Bangka Belitung	1.061	0.189	7.844	0.186	0.997	2.055	7
10	Kepulauan Riau	0.994	0.252	2.994	0.256	0.992	1.098	21
11	DKI. Jakarta	1.221	1.267	0.597	1.289	0.926	1.060	25
12	Jawa Barat	1.037	5.774	0.113	5.945	0.946	2.763	1
13	Jawa Tengah	1.024	4.828	0.251	4.782	1.032	2.384	5
14	D.I. Yogyakarta	1.097	0.577	3.234	0.562	1.068	1.308	15
15	Jawa Timur	1.118	5.647	0.247	5.559	1.027	2.720	2
16	Banten	1.066	1.426	0.399	1.486	0.931	1.062	24
17	Bali	1.088	0.674	5.729	0.646	1.124	1.852	10
18	Nusa Tenggara Barat	0.923	0.651	2.606	0.636	1.023	1.168	19
19	Nusa Tenggara Timur	0.737	0.652	2.636	0.637	1.032	1.139	20
20	Kalimantan Barat	0.963	0.647	1.971	0.639	1.025	1.049	27
21	Kalimantan Tengah	1.059	0.344	3.837	0.339	1.012	1.318	13
22	Kalimantan Selatan	1.012	0.555	2.093	0.551	1.047	1.051	26
23	Kalimantan Timur	1.076	0.433	1.812	0.439	0.952	0.942	31
24	Kalimantan Utara	0.953	0.088	11.306	0.088	1.019	2.691	3
25	Sulawesi Utara	1.031	0.292	2.573	0.298	0.909	1.021	29
26	Sulawesi Tengah	0.969	0.386	3.809	0.379	1.003	1.309	14
27	Sulawesi Selatan	0.927	1.011	0.969	1.012	0.911	0.966	30
28	Sulawesi Tenggara	0.802	0.326	5.225	0.319	1.026	1.540	12
29	Gorontalo	1.014	0.147	8.830	0.145	0.968	2.221	6
30	Sulawesi Barat	0.850	0.167	10.488	0.163	1.000	2.534	4
31	Maluku	0.821	0.180	3.150	0.188	0.899	1.048	28
32	Maluku Utara	0.818	0.137	7.525	0.137	0.951	1.914	9
33	Papua Barat	0.965	0.113	7.408	0.114	1.008	1.922	8
34	Papua	1.002	0.477	3.247	0.468	1.149	1.269	16

Sumber: Hasil pengolahan tim

Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam yang memadai dapat menciptakan iklim ekonomi yang dinamis. Infrastruktur dan sumber daya alam merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sangat mempengaruhi kelancaran dunia usaha di suatu daerah. Begitu pula dengan ketersediaan sumber daya alam. Semakin besar skala suatu usaha, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya

alam juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, peningkatan sarana-prasarana daerah baik sebagai penunjang atau pendukung aktivitas usaha dan kekayaan sumber daya alam menjadi sangat perlu untuk dikembangkan dan tingkatkan nilai kegunaannya. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha di daerah. Semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga semakin besar sehingga dibutuhkan kesinambungan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut. Sumber daya alam yang melimpah juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Indikator yang dipakai untuk menunjukkan infrastruktur dan sumber daya alam adalah Panjang Jalan Raya kilometer (ISDA1), Kualitas Jalan Raya % (ISDA2), Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik MegaWatt (ISDA3), Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN % (ISDA4), Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan % (ISDA5).

Untuk lingkup infrastruktur dan sumber daya alam seperti pada Tabel 4.4, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 25 dengan skor 0.783, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing rendah” dan menjadi yang terendah diantara indikator daya saing input lainnya. Dari kelima variabel yang mewaliki indikator infrastruktur dan sumber daya alam, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel ISDA1 (peringkat ke-20), ISDA2 (peringkat ke-20), dan ISDA4 (peringkat ke-22). Peringkat terendah pada variabel ISDA3 (peringkat ke-30), dan ISDA5 (peringkat ke-25). Untuk meningkatkan daya saing indikator infrastruktur dan sumber daya alam, pemerintah daerah Provinsi Jambi perlu meningkatkan skor daya saing terutama kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik dan akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan.

Secara nasional, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dalam daya saing input infrastruktur dan sumber daya alam dengan skor 2.793. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah,

Sumatera Utara dan Jawa Barat. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan skor 0.644. Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Lampung, dan Provinsi Jambi.

Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-4) dan Sumatera Selatan (peringkat ke-6). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-12), Kepulauan Riau (peringkat ke-20), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Riau (peringkat ke-24). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) selain Provinsi Jambi, yaitu Lampung (peringkat ke-26), Bangka Belitung (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-33).

Tabel 4.4.
Tingkat Daya Saing Input Provinsi di Indonesia
Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

No.	Provinsi	Infrastruktur dan Sumber Daya Alam					ISDA	Rangking
		ISDA 1	ISDA 2	ISDA 3	ISDA 4	ISDA 5		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.520	1.053	0.142	1.098	0.921	0.947	12
2	Sumatera Utara	1.903	0.901	2.603	1.068	1.027	1.501	4
3	Sumatera Barat	1.048	0.971	0.050	1.063	0.979	0.822	22
4	Riau	0.967	0.915	0.107	0.928	1.098	0.803	24
5	Jambi	0.953	0.996	0.037	1.008	0.920	0.783	25
6	Sumatera Selatan	1.157	0.926	1.931	1.031	0.927	1.194	6
7	Bengkulu	0.573	1.057	0.016	1.063	0.543	0.651	33
8	Lampung	0.934	0.983	0.074	1.031	0.762	0.757	26
9	Bangka Belitung	0.434	1.104	0.193	1.087	0.930	0.750	27
10	Kepulauan Riau	0.424	1.008	0.452	1.059	1.241	0.837	20
11	DKI. Jakarta	0.039	1.096	0.834	1.115	1.344	0.886	15
12	Jawa Barat	1.294	1.047	2.503	1.110	0.983	1.387	5
13	Jawa Tengah	1.098	1.025	3.164	1.115	1.110	1.502	3
14	D.I. Yogyakarta	0.179	1.081	0.000	1.117	1.179	0.711	32
15	Jawa Timur	1.707	1.043	9.004	1.105	1.103	2.793	1
16	Banten	0.408	1.031	7.901	1.111	0.981	2.287	2
17	Bali	0.455	1.071	0.624	1.117	1.290	0.912	14
18	Nusa Tenggara Barat	0.676	1.087	0.242	1.093	1.076	0.835	21
19	Nusa Tenggara Timur	1.344	0.973	0.182	0.728	0.873	0.820	23

No.	Provinsi	Infrastruktur dan Sumber Daya Alam					ISDA	Rangking
		ISDA 1	ISDA 2	ISDA 3	ISDA 4	ISDA 5		
20	Kalimantan Barat	1.531	1.015	0.401	0.914	0.963	0.965	11
21	Kalimantan Tengah	1.448	0.964	0.044	0.863	0.891	0.842	18
22	Kalimantan Selatan	0.871	1.050	1.026	1.075	0.853	0.975	10
23	Kalimantan Timur	1.237	1.030	0.646	1.029	1.148	1.018	8
24	Kalimantan Utara	0.423	0.912	0.061	0.973	1.203	0.714	31
25	Sulawesi Utara	1.203	1.029	0.220	1.098	1.021	0.914	13
26	Sulawesi Tengah	1.716	1.038	0.258	0.967	0.904	0.977	9
27	Sulawesi Selatan	1.263	1.033	0.756	1.057	1.068	1.035	7
28	Sulawesi Tenggara	1.083	1.014	0.078	0.981	1.103	0.852	16
29	Gorontalo	0.541	0.995	0.019	1.042	1.041	0.728	30
30	Sulawesi Barat	0.552	0.960	0.002	0.848	0.858	0.644	34
31	Maluku	1.281	0.911	0.145	0.937	0.977	0.850	17
32	Maluku Utara	0.870	0.936	0.045	0.886	0.916	0.731	29
33	Papua Barat	0.959	0.838	0.069	0.840	1.000	0.741	28
34	Papua	1.907	0.906	0.166	0.446	0.766	0.838	19

Sumber: Hasil pengolahan tim

Setelah dilakukan analisis keempat variabel dari indikator daya saing input secara nasional, dapat disimpulkan bahwa provinsi menurut peringkat daya saing input adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5. Provinsi Jambi menempati peringkat ke 19 yang masuk dalam kategori provinsi dengan daya saing menengah.

Untuk meningkatkan daya saing, Pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan hampir semua indikator input, terutama pada indikator input yang masih berada pada peringkat diatas 10, yaitu:

- (1) Angka Melek Huruf (peringkat 15)
- (2) Tingkat Kemiskinan (Peringkat 16)
- (3) Realisasi PMA (peringkat ke-12)
- (4) Realisasi PMDN (peringkat ke-15)
- (5) Laju Pertumbuhan PDRB (peringkat ke-29)
- (6) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (peringkat ke-19)
- (7) Realisasi Pajak Daerah (peringkat ke-18)
- (8) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (peringkat ke-16)
- (9) Jumlah penduduk yang bekerja ribu jiwa (peringkat ke-20)
- (10) Jumlah penduduk yang menganggur (peringkat ke-15)
- (11) Panjang Jalan Raya (peringkat ke-20)

- (12) Kualitas Jalan Raya (peringkat ke-20)
- (13) Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik MegaWatt (peringkat ke-30)
- (14) Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN
(peringkat ke-22)
- (15) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air
Minum Layak Dan Berkelanjutan (peringkat ke-25)

Secara nasional, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dalam daya saing input. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Bali. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku. Provinsi Maluku membutuhkan peningkatan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.

Di Pulau Sumatera, hanya terdapat satu provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing input kategori menengah selain Provinsi Jambi, adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-16), Kepulauan Riau (peringkat ke-17), Riau (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-31), Bengkulu (peringkat ke-30), dan Sumatera Barat (peringkat ke-28).

Tabel 4.5.
Tingkat Daya Saing Input Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

No.	Provinsi	Rangking Daya Saing Input				Rangking
		LUP	PD	SDM	ISDA	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	25	28	34	12	31
2	Sumatera Utara	17	6	18	4	7
3	Sumatera Barat	13	23	32	22	28
4	Riau	16	7	33	24	20
5	Jambi	19	15	17	25	19
6	Sumatera Selatan	27	11	22	6	12
7	Bengkulu	28	24	11	33	30
8	Lampung	22	14	23	26	24
9	Bangka Belitung	9	31	7	27	16
10	Kepulauan Riau	7	26	21	20	17
11	DKI. Jakarta	1	1	25	15	6
12	Jawa Barat	4	2	1	5	1
13	Jawa Tengah	8	4	5	3	3
14	D.I. Yogyakarta	5	10	15	32	11
15	Jawa Timur	10	3	2	1	2
16	Banten	3	5	24	2	4
17	Bali	2	13	10	14	5
18	Nusa Tenggara Barat	23	21	19	21	23
19	Nusa Tenggara Timur	33	29	20	23	33
20	Kalimantan Barat	21	12	27	11	14
21	Kalimantan Tengah	11	18	13	18	10
22	Kalimantan Selatan	6	16	26	10	8
23	Kalimantan Timur	12	8	31	8	9
24	Kalimantan Utara	18	34	3	31	26
25	Sulawesi Utara	15	25	29	13	21
26	Sulawesi Tengah	29	22	14	9	18
27	Sulawesi Selatan	20	9	30	7	13
28	Sulawesi Tenggara	24	20	12	16	15
29	Gorontalo	30	33	6	30	32
30	Sulawesi Barat	26	27	4	34	29
31	Maluku	31	32	28	17	34
32	Maluku Utara	14	30	9	29	22
33	Papua Barat	32	17	8	28	25
34	Papua	34	19	16	19	27

Sumber: Hasil pengolahan tim

(2) Daya Saing Output

Faktor pembentuk daya saing output pembentuk daya saing daerah Provinsi di Indonesia terdiri dari empat variabel utama, yaitu produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Pekerja) (DSO1), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % (DSO2), PDRB per kapita juta rupiah (DSO3), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (DSO4). Keempat variabel tersebut akan dibahas satu persatu.

Pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Produktivitas dapat diukur berdasar pendekatan nilai tambah, ataupun perbandingan antar nilai tambah dengan sumber yang terpakai (*resource used*) dapat menunjukkan tingkat produktivitas. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor ketenagakerjaan yang paling penting mengingat peranan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dapat mendorong performa perusahaan semakin baik. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari sisi kemampuannya untuk menghasilkan suatu output secara efektif dan efisien. Tinggi rendahnya produktivitas sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja.

Apabila dilihat dari variabel produktivitas tenaga kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.917 dan menempati urutan ke 8 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) dan Riau (peringkat ke-4). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Bangka Belitung (peringkat ke-13), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-19), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-30). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing produktivitas tenaga kerja dengan skor 3.975. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Utara. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 0.300. Selain Nusa Tenggara Timur, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maluku, DI

Yogyakarta, Bengkulu, Maluku Utara Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pembentuk daya saing output **kedua** adalah tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Berdasarkan variabel tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.013 dan menempati urutan ke 11 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-8) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Lampung (peringkat ke-15), Sumatera Selatan (peringkat ke-17), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Sumatera Utara (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-30), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27), dan Riau (peringkat ke-25). Secara nasional, Provinsi Bali menempati urutan pertama dalam daya saing tingkat kesempatan kerja dengan skor 1.038. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku dengan skor 0.956. Selain Maluku, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua Barat, dan Riau.

Selanjutnya, pembentuk daya saing output **ketiga** adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Bila daya saing diukur dengan variabel PDRB per kapita,

terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.961 dan menempati urutan ke 8 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3), Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-12, Sumatera Selatan (peringkat ke-13), Sumatera Barat (peringkat ke-21) dan Lampung (peringkat ke-23) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-29) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing PDRB per kapita dengan skor 3.816. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Riau. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 0.293. Selain Nusa Tenggara Timur, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Keempat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan daya saing output menggunakan variabel IPM, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.003 dan menempati urutan ke 16 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera,

terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-4), Riau (peringkat ke-6), dan Sumatera Barat (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-17), Bengkulu (peringkat ke-18), Sumatera Selatan (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, tidak ada satupun provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta kembali menempati urutan pertama dalam daya saing IPM dengan skor 1.148. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bali. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Papua dengan skor 0.847. Selain Papua, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Keseluruhan variabel pembentuk daya saing output tersebut kemudian digabungkan untuk menentukan provinsi mana yang memiliki daya saing output tertinggi dan terendah. Pada Tabel 4.6 untuk Daya Saing Output Keseluruhan, Provinsi Jambi menempati posisi ke-8, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Dengan skor standar 0.974. Dari semua variabel pembentuk daya saing output, variabel yang berkontribusi besar dalam daya saing output Provinsi Jambi adalah variabel produktivitas tenaga kerja dan PDRB per kapita. Untuk meningkatkan daya saing outputnya pemerintah daerah perlu meningkatkan skor daya saing output, terutama variabel tingkat kesempatan kerja, dan IPM.

Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing output. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Riau. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan perbaikan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, dan IPM

untuk meningkatkan skor daya saing output. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jawa Tengah.

Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing output kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-28) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-26).

Tabel 4.6.
Tingkat Daya Saing Output Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

No.	Provinsi	Daya Saing Output				DSO	Rangking
		DSO1	DSO2	DSO3	DSO4		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.634	0.985	0.582	1.012	0.803	26
2	Sumatera Utara	0.848	0.995	0.838	1.012	0.923	11
3	Sumatera Barat	0.735	0.995	0.717	1.021	0.867	20
4	Riau	1.922	0.988	1.799	1.029	1.434	5
5	Jambi	0.917	1.013	0.961	1.003	0.974	8
6	Sumatera Selatan	0.788	1.007	0.833	0.987	0.904	16
7	Bengkulu	0.500	1.014	0.536	1.003	0.763	28
8	Lampung	0.627	1.008	0.651	0.978	0.816	23
9	Bangka Belitung	0.828	1.014	0.870	1.003	0.929	10
10	Kepulauan Riau	2.115	0.978	2.046	1.067	1.552	3
11	DKI. Jakarta	3.975	0.978	3.816	1.148	2.479	1
12	Jawa Barat	0.723	0.967	0.686	1.013	0.847	22
13	Jawa Tengah	0.575	1.006	0.636	1.011	0.807	25
14	D.I. Yogyakarta	0.497	1.022	0.600	1.131	0.813	24
15	Jawa Timur	0.814	1.012	0.916	1.007	0.937	9
16	Banten	0.889	0.956	0.809	1.024	0.919	12
17	Bali	0.666	1.038	0.832	1.065	0.900	17
18	Nusa Tenggara Barat	0.475	1.019	0.492	0.955	0.735	31
19	Nusa Tenggara Timur	0.300	1.019	0.293	0.914	0.631	34
20	Kalimantan Barat	0.597	1.008	0.619	0.950	0.794	27
21	Kalimantan Tengah	0.799	1.009	0.838	1.001	0.912	14
22	Kalimantan Selatan	0.682	1.003	0.727	0.999	0.853	21

No.	Provinsi	Daya Saing Output				DSO	Rangking
		DSO1	DSO2	DSO3	DSO4		
23	Kalimantan Timur	3.317	0.981	3.194	1.077	2.142	2
24	Kalimantan Utara	1.907	0.995	1.956	1.001	1.465	4
25	Sulawesi Utara	0.836	0.978	0.782	1.027	0.906	15
26	Sulawesi Tengah	0.772	1.014	0.794	0.976	0.889	19
27	Sulawesi Selatan	0.871	0.995	0.797	1.008	0.918	13
28	Sulawesi Tenggara	0.780	1.019	0.776	1.002	0.894	18
29	Gorontalo	0.522	1.009	0.520	0.961	0.753	30
30	Sulawesi Barat	0.539	1.020	0.537	0.922	0.755	29
31	Maluku	0.477	0.956	0.390	0.978	0.700	33
32	Maluku Utara	0.514	0.998	0.463	0.963	0.734	32
33	Papua Barat	1.583	0.985	1.560	0.903	1.258	6
34	Papua	0.976	1.016	1.132	0.847	0.993	7

Sumber: Hasil pengolahan tim

(3) Daya Saing Input Output

Daya saing ekonomi suatu daerah merupakan topik yang menarik untuk dicermati karena globalisasi mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi semakin meningkat tajam dan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Provinsi Jambi sebagai daerah bagian di Indonesia mengikuti kecenderungan daya saing daerah yang berlaku. Pada Tabel 4.7 untuk Daya Saing Input Output Keseluruhan, Provinsi Jambi menempati posisi ke-13, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing menengah”.

Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas untuk daya saing input output secara keseluruhan, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-5), Kepulauan Riau (peringkat ke-6), dan Riau (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing output kategori menengah, selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-11), dan Sumatera Selatan (peringkat ke-14). Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-30), Sumatera Barat (peringkat ke-26), dan Lampung (peringkat ke-25).

Di tingkat nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing input output secara keseluruhan. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Di posisi

terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Lampung.

Tabel 4.7.
Tingkat Daya Saing Output Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

Provinsi	Rangking Daya Saing		
	Input	Output	Total
DKI. Jakarta	6	1	1
Jawa Timur	2	9	2
Kalimantan Timur	9	2	3
Banten	4	12	4
Sumatera Utara	7	11	5
Kepulauan Riau	17	3	6
Bali	5	17	7
Jawa Barat	1	22	8
Kalimantan Tengah	10	14	9
Riau	20	5	10
Bangka Belitung	16	10	11
Sulawesi Selatan	13	13	12
Jambi	19	8	13
Sumatera Selatan	12	16	14
Jawa Tengah	3	25	15
Kalimantan Selatan	8	21	16
Kalimantan Utara	26	4	17
Papua Barat	25	6	18
Sulawesi Tenggara	15	18	19
Papua	27	7	20
D.I. Yogyakarta	11	24	21
Sulawesi Utara	21	15	22
Sulawesi Tengah	18	19	23
Kalimantan Barat	14	27	24
Lampung	24	23	25
Sumatera Barat	28	20	26
Nusa Tenggara Barat	23	31	27
Maluku Utara	22	32	28
Nanggroe Aceh Darussalam	31	26	29
Bengkulu	30	28	30
Sulawesi Barat	29	29	31
Gorontalo	32	30	32
Nusa Tenggara Timur	33	34	33
Maluku	34	33	34

Sumber: Hasil pengolahan tim

Gambaran daya saing provinsi di Indonesia merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu provinsi, dan adapun juga sebaliknya.

Dalam penghitungannya, skor daya saing tiap provinsi di Indonesia, dibandingkan dengan rata-rata skor input (rata-rata skor indikator input, 1.1346) dan output (rata-rata skor indikator output, 1.0000) dari keseluruhan skor daya saing provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan Provinsi Jambi berada pada kuadran III menunjukkan daerah yang memiliki skor input dan output dibawah rata-rata dan memiliki kemampuan daya saing rendah.

Pemetaan daya saing provinsi di Indonesia dilakukan dengan menentukan klasifikasi provinsi berdasarkan kinerja indikator input dan indikator output. Semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing provinsi di Indonesia. Daya saing provinsi dapat diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dengan pembagian sebagai berikut:

Kuadran I: Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator input dan outputnya.

Kuadran II: Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali merupakan provinsi yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator inputnya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator outputnya masih dibawah kinerja rata-rata.

Kuadran III: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, **Jambi**, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua merupakan provinsi yang mempunyai karakteristik kinerja indikator input dan outputnya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata input dan output nasional.

Kuadran IV: Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,

The scatter plot displays the relationship between 'Indikator Input' (X-axis) and 'Indikator Output' (Y-axis) for various Indonesian provinces. The X-axis ranges from 0,00 to 5,00, and the Y-axis ranges from 0,00 to 3,00. A red vertical line is drawn at x=1,1 and a red horizontal line at y=1,0. The provinces are labeled with their abbreviations. JKT is the outlier with the highest values. JAMBI is highlighted with an orange box as having the lowest input.

Province	Indikator Input (X)	Indikator Output (Y)
JKT	3,4	2,5
KALTIM	1,1	2,1
KEPRI	0,8	1,6
KALUT	1,0	1,5
RIAU	0,9	1,4
PABAR	1,0	1,3
PAPUA	0,7	1,0
JAMBI	0,4	0,8
SUMUT	1,2	0,9
BALI	1,1	0,9
BANTEN	1,5	0,9
JATIM	2,5	0,9
SUMBAR	0,8	0,8
DIY	0,9	0,8
ACEH	0,8	0,8
ROG	0,9	0,8
CELE	0,9	0,8
NTT	0,8	0,7
NTB	0,9	0,7
RIAU	1,0	0,7
CELE	0,9	0,6
RIAU	1,0	0,6
RIAU	1,1	0,6
RIAU	1,2	0,6
RIAU	1,3	0,6
RIAU	1,4	0,6
RIAU	1,5	0,6
RIAU	1,6	0,6
RIAU	1,7	0,6
RIAU	1,8	0,6
RIAU	1,9	0,6
RIAU	2,0	0,6
RIAU	2,1	0,6
RIAU	2,2	0,6
RIAU	2,3	0,6
RIAU	2,4	0,6
RIAU	2,5	0,6
RIAU	2,6	0,6
RIAU	2,7	0,6
RIAU	2,8	0,6
RIAU	2,9	0,6
RIAU	3,0	0,6
RIAU	3,1	0,6
RIAU	3,2	0,6
RIAU	3,3	0,6
RIAU	3,4	0,6
RIAU	3,5	0,6
RIAU	3,6	0,6
RIAU	3,7	0,6
RIAU	3,8	0,6
RIAU	3,9	0,6
RIAU	4,0	0,6
RIAU	4,1	0,6
RIAU	4,2	0,6
RIAU	4,3	0,6
RIAU	4,4	0,6
RIAU	4,5	0,6
RIAU	4,6	0,6
RIAU	4,7	0,6
RIAU	4,8	0,6
RIAU	4,9	0,6
RIAU	5,0	0,6
RIAU	0,1	0,5
RIAU	0,2	0,5
RIAU	0,3	0,5
RIAU	0,4	0,5
RIAU	0,5	0,5
RIAU	0,6	0,5
RIAU	0,7	0,5
RIAU	0,8	0,5
RIAU	0,9	0,5
RIAU	1,0	0,5
RIAU	1,1	0,5
RIAU	1,2	0,5
RIAU	1,3	0,5
RIAU	1,4	0,5
RIAU	1,5	0,5
RIAU	1,6	0,5
RIAU	1,7	0,5
RIAU	1,8	0,5
RIAU	1,9	0,5
RIAU	2,0	0,5
RIAU	2,1	0,5
RIAU	2,2	0,5
RIAU	2,3	0,5
RIAU	2,4	0,5
RIAU	2,5	0,5
RIAU	2,6	0,5
RIAU	2,7	0,5
RIAU	2,8	0,5
RIAU	2,9	0,5
RIAU	3,0	0,5
RIAU	3,1	0,5
RIAU	3,2	0,5
RIAU	3,3	0,5
RIAU	3,4	0,5
RIAU	3,5	0,5
RIAU	3,6	0,5
RIAU	3,7	0,5
RIAU	3,8	0,5
RIAU	3,9	0,5
RIAU	4,0	0,5
RIAU	4,1	0,5
RIAU	4,2	0,5
RIAU	4,3	0,5
RIAU	4,4	0,5
RIAU	4,5	0,5
RIAU	4,6	0,5
RIAU	4,7	0,5
RIAU	4,8	0,5
RIAU	4,9	0,5
RIAU	5,0	0,5
RIAU	0,1	0,4
RIAU	0,2	0,4
RIAU	0,3	0,4
RIAU	0,4	0,4
RIAU	0,5	

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa berdasarkan indikator input dan output, Provinsi Jambi berada pada Kuadran III, yaitu provinsi yang mempunyai karakteristik kinerja indikator input dan outputnya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata input dan output nasional. Hal ini dikarenakan semua indikator input masih berada diatas peringkat 15 besar, sedangkan untuk kinerja indikator output kinerjanya cukup baik karena ditopang oleh indikator produktivitas tenaga kerja dan PDRB perkapita yang berada pada peringkat yang cukup tinggi yaitu peringkat ke-8 dan ke-11.

IV-32

(b) Tingkat Kemiskinan (Peringkat 16); (c) Realisasi PMA (peringkat ke-12); (d) Realisasi PMDN (peringkat ke-15); (e) Laju Pertumbuhan PDRB (peringkat ke-29); (f) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (peringkat ke-19); (g) Realisasi Pajak Daerah (peringkat ke-18); (h) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (peringkat ke-16); (i) Jumlah penduduk yang bekerja ribu jiwa (peringkat ke-20); (j) Jumlah penduduk yang menganggur (peringkat ke-15); (k) Panjang Jalan Raya (peringkat ke-20); (l) Kualitas Jalan Raya (peringkat ke-20); (m) Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik MegaWatt (peringkat ke-30); (n) Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN (peringkat ke-22); dan (o) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan (peringkat ke-25). Sedangkan pada indikator output yang perlu terus dioptimalkan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (peringkat ke-16)

4.1.3. Daya Saing Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

(1) Daya Saing Input

Untuk menganalisis daya saing input Provinsi Jambi, maka akan dianalisis pada tataran Kabupaten dan Kota dengan menggunakan daya saing dari dua aspek, yaitu daya saing input dan daya saing output. Daya saing input dari sisi lingkungan usaha produktif terdiri dari 5 variabel, yaitu Angka Melek Kuruf (AMH) % atau LUP1, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % atau LUP2, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % atau LUP3, Tingkat kemiskinan % atau LUP4, dan Kepadatan penduduk jiwa/km² atau LUP5.

Dilihat dari daya saing usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kota Sungai Penuh. Seperti hasil pada analisis lain yang terkait, misalnya daya saing dari angka LQ dan Klassen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan peringkat terendah dilihat dari aspek input lingkungan usaha produktif. Secara lengkap, daya saing ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Tingkat Daya Saing Input Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif

No.	Kabupaten/Kota	Lingkungan Usaha Produktif					LUP	Rangking
		LUP1	LUP2	LUP3	LUP4	LUP5		
1	Kerinci	0.992	0.977	1.076	1.081	0.305	0.886	5
2	Merangin	1.003	1.013	0.964	0.854	0.146	0.796	8
3	Sarolangun	0.991	0.991	0.955	0.908	0.140	0.797	7
4	Batang Hari	1.004	1.008	0.981	0.780	0.137	0.782	9
5	Muaro Jambi	1.008	1.007	0.961	1.843	0.237	1.011	3
6	Tanjung Jabung Timur	0.966	1.008	1.032	0.640	0.120	0.753	11
7	Tanjung Jabung Barat	0.999	0.987	0.992	0.711	0.191	0.776	10
8	Tebo	0.999	1.002	0.904	1.186	0.158	0.850	6
9	Bungo	1.006	0.990	1.014	1.384	0.229	0.925	4
10	Kota Jambi	1.014	1.000	0.966	0.911	8.655	2.509	1
11	Kota Sungai Penuh	1.017	1.017	1.155	2.897	0.682	1.354	2

Sumber: Hasil pengolahan tim

Untuk menganalisis daya saing input Provinsi Jambi, dari sisi perekonomian daerah terdiri dari 6 variabel, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Juta Rupiah atau PD1, Laju Pertumbuhan PDRB atau PD2, Realisasi PMDN Juta Rp atau PD3, Realisasi PMA (000) USD atau PD4, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ribu Rp atau PD5, dan Realisasi Pajak Daerah Ribu Rp atau PD6.

Dilihat dengan menggunakan indikator perekonomian daerah, seperti halnya lingkungan usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun. Dengan indikator ini, Kota Sungai Penuh justru berada pada peringkat terbawah bersama Kabupaten Kerinci. Secara lengkap, daya saing ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Tingkat Daya Saing Input Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

No.	Kabupaten/Kota	Perekonomian Daerah						PD	Rangking
		PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6		
1	Kerinci	0.407	1.295	0.078	0.000	0.756	0.323	0.477	10
2	Merangin	0.633	1.201	0.261	0.193	0.886	0.556	0.622	7
3	Sarolangun	0.699	0.824	0.177	6.289	0.768	0.323	1.513	3
4	Batang Hari	0.756	0.880	0.441	0.830	0.887	0.505	0.717	6
5	Muaro Jambi	1.041	1.050	0.726	0.654	0.598	0.711	0.797	5
6	Tanjung Jabung Timur	1.213	0.522	0.055	0.429	0.427	0.425	0.512	8
7	Tanjung Jabung Barat	1.957	0.607	7.961	0.728	0.920	0.748	2.153	2
8	Tebo	0.652	1.040	0.084	0.089	0.756	0.439	0.510	9

No.	Kabupaten/Kota	Perekonomian Daerah						PD	Rangking
		PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6		
9	Bungo	0.811	1.005	0.749	1.115	1.301	0.838	0.970	4
10	Kota Jambi	2.537	1.317	0.468	0.653	3.267	5.762	2.334	1
11	Kota Sungai Penuh	0.294	1.259	0.000	0.020	0.434	0.370	0.396	11

Sumber: Hasil pengolahan tim

Analisis daya saing input berikutnya adalah dari sisi sumber daya manusia. Adapun indikatornya terdiri dari Rasio ketergantungan (SDM1), Jumlah penduduk yang bekerja (SDM2), Jumlah penduduk yang menganggur (SDM3), Jumlah angkatan kerja (SDM4), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDM5). Dari hasil pemeringkatan, Kota Jambi tetap menjadi peringkat pertama dalam kelompok daya saing ini.

Tabel 4.10.
Tingkat Daya Saing Input Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

No.	Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia					SDM	Rangking
		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	SDM5		
1	Kerinci	1.041	0.800	1.494	0.795	1.020	1.030	8
2	Merangin	0.988	1.200	0.785	1.203	1.026	1.040	7
3	Sarolangun	0.894	0.929	1.882	0.913	1.029	1.130	5
4	Batang Hari	1.012	0.792	1.376	0.789	0.946	0.983	10
5	Muaro Jambi	1.053	1.198	0.591	1.217	0.915	0.995	9
6	Tanjung Jabung Timur	0.982	0.790	2.111	0.777	1.116	1.155	4
7	Tanjung Jabung Barat	0.978	1.041	1.222	1.032	1.032	1.061	6
8	Tebo	0.978	1.130	1.764	1.108	1.037	1.203	2
9	Bungo	0.964	1.065	0.736	1.076	0.968	0.962	11
10	Kota Jambi	1.156	1.780	0.386	1.812	0.941	1.215	1
11	Kota Sungai Penuh	0.996	0.277	3.371	0.278	0.970	1.178	3

Sumber: Hasil pengolahan tim

Dari daya saing infrastruktur dan sumber daya alam yang terdiri dari Panjang Jalan Raya km (ISDA1), Kualitas Jalan Raya % (ISDA2), Cakupan Pelayanan Perusahaan Air Bersih % (ISDA3), Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN (ISDA4), Persentase penduduk 5+ Memiliki/Menguasai Telepon Selular (ISDA5), Persentase penduduk 5+ menggunakan internet (ISDA6), Persentase Penduduk 5+ Penggunaan Komputer (ISDA7), dan Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum bersumber dari Ledeng Meteran (ISDA8).

Dengan menggunakan indikator infrastruktur dan sumber daya alam, Kota Sungai Penuh berada pada peringkat pertama dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada peringkat terbawah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11.
Tingkat Daya Saing Input Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

No.	Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Sumber Daya Alam								ISDA	Rangking
		ISDA1	ISDA2	ISDA3	ISDA4	ISDA5	ISDA6	ISDA7	ISDA8		
1	Kerinci	0.973	1.047	1.311	1.075	0.994	0.937	1.148	3.328	1.352	3
2	Merangin	1.333	1.072	0.656	0.995	0.906	0.839	0.922	0.185	0.863	8
3	Sarolangun	1.446	0.971	1.311	0.981	0.946	0.738	0.674	0.251	0.915	6
4	Batang Hari	1.604	0.838	1.311	1.013	0.909	0.946	0.834	0.402	0.982	4
5	Muaro Jambi	1.079	1.078	0.590	1.082	1.045	0.942	0.878	0.701	0.924	5
6	Tanjung Jabung Timur	0.815	0.917	1.075	0.716	0.968	0.756	0.471	0.000	0.715	11
7	Tanjung Jabung Barat	1.020	0.945	0.603	0.839	1.009	0.801	0.580	0.184	0.748	10
8	Tebo	1.193	0.897	0.983	1.050	0.898	0.760	0.665	0.413	0.857	9
9	Bungo	1.012	0.990	0.774	1.015	0.932	0.917	0.883	0.434	0.870	7
10	Kota Jambi	0.476	1.143	1.075	1.118	1.311	2.000	2.294	1.517	1.367	2
11	Kota Sungai Penuh	0.050	1.102	1.311	1.116	1.083	1.363	1.651	3.587	1.408	1

Sumber: Hasil pengolahan tim

Dari 4 aspek daya saing input yang telah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota menurut peringkat daya saing input adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Tingkat Daya Saing Input Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Rangking Daya Saing Input				Rata-Rata Daya Saing Input	Rangking
		LUP	PD	SDM	ISDA		
1	Kerinci	0.886	0.477	1.030	1.352	0.936	5
2	Merangin	0.796	0.622	1.040	0.863	0.830	10
3	Sarolangun	0.797	1.513	1.130	0.915	1.089	3
4	Batang Hari	0.782	0.717	0.983	0.982	0.866	8
5	Muaro Jambi	1.011	0.797	0.995	0.924	0.932	6
6	Tanjung Jabung Timur	0.753	0.512	1.155	0.715	0.784	11
7	Tanjung Jabung Barat	0.776	2.153	1.061	0.748	1.184	2
8	Tebo	0.850	0.510	1.203	0.857	0.855	9
9	Bungo	0.925	0.970	0.962	0.870	0.932	7
10	Kota Jambi	2.509	2.334	1.215	1.367	1.856	1
11	Kota Sungai Penuh	1.354	0.396	1.178	1.408	1.084	4

Sumber: Hasil pengolahan tim

Kota Jambi yang unggul pada 3 kriteria input pada analisis sebelumnya, secara keseluruhan tetap menempati peringkat pertama dari daya saing input, disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun.

(2) Daya Saing Output

Daya saing selain dilihat dari indikator input juga dilakukan berdasarkan indikator output. Indikator output yang dilakukan pengukuran adalah:

- DSO1 : Produktivitas tenaga kerja
- DSO2 : Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
- DSO3 : PDRB per kapita
- DSO4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara rata-rata bobot tertinggi (peringkat 1) adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai sebesar 1.442. Komponen tertinggi adalah Produktifitas tenaga kerja (1.906) dan PDRB perkapita yaitu sebesar 1.898. Tiga Daerah tertinggi selanjutnya berturut-turut adalah Tanjung Jabung Timur; Kota Sungai Penuh; dan Kota Jambi, masing-masing memiliki nilai 1.283; 1.096; dan 1.084. Sedangkan 3 daerah terendah adalah Kabupaten Merangin dengan nilai 0.785 (peringkat 11), Kabupaten Kerinci sebesar 0.797 (peringkat 10), dan Kabupaten Tebo sebesar 0.812 (peringkat 9). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.13.
Tingkat Daya Saing Output Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Daya Saing Output				DSO	Rangking
		DSO1	DSO2	DSO3	DSO4		
1	Kerinci	0.516	1.004	0.653	1.013	0.797	10
2	Merangin	0.535	0.996	0.623	0.988	0.785	11
3	Sarolangun	0.762	1.015	0.824	0.998	0.900	7
4	Batang Hari	0.968	1.001	0.967	0.997	0.983	5
5	Muaro Jambi	0.880	0.982	0.890	0.981	0.934	6
6	Tanjung Jabung Timur	1.556	1.014	1.657	0.905	1.283	2
7	Tanjung Jabung Barat	1.906	1.006	1.898	0.957	1.442	1
8	Tebo	0.585	1.018	0.660	0.986	0.812	9
9	Bungo	0.771	0.988	0.780	0.998	0.884	8
10	Kota Jambi	1.444	0.981	0.801	1.110	1.084	4
11	Kota Sungai Penuh	1.077	0.995	1.246	1.067	1.096	3

Sumber: Hasil pengolahan tim

(3) Daya Saing Input Output

Jika diakumulasikan antara indikator input dan output menunjukkan bahwa 4 Daerah yang memiliki kinerja tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan 4 daerah dengan kinerja terendah adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.14.
Tingkat Daya Saing Input Output Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

Kab/Kota	Rangking Daya Saing		
	Input	Output	Total
Tanjung Jabung Barat	2	1	1
Kota Jambi	1	4	2
Kota Sungai Penuh	4	3	3
Sarolangun	3	7	4
Muaro Jambi	6	6	5
Batang Hari	8	5	6
Tanjung Jabung Timur	11	2	7
Kerinci	5	10	8
Bungo	7	8	9
Tebo	9	9	10
Merangin	10	11	11

Sumber: Hasil pengolahan tim

Selanjutnya jika dilakukan pemetaan secara kuadran menunjukkan bahwa daerah yang berada pada:

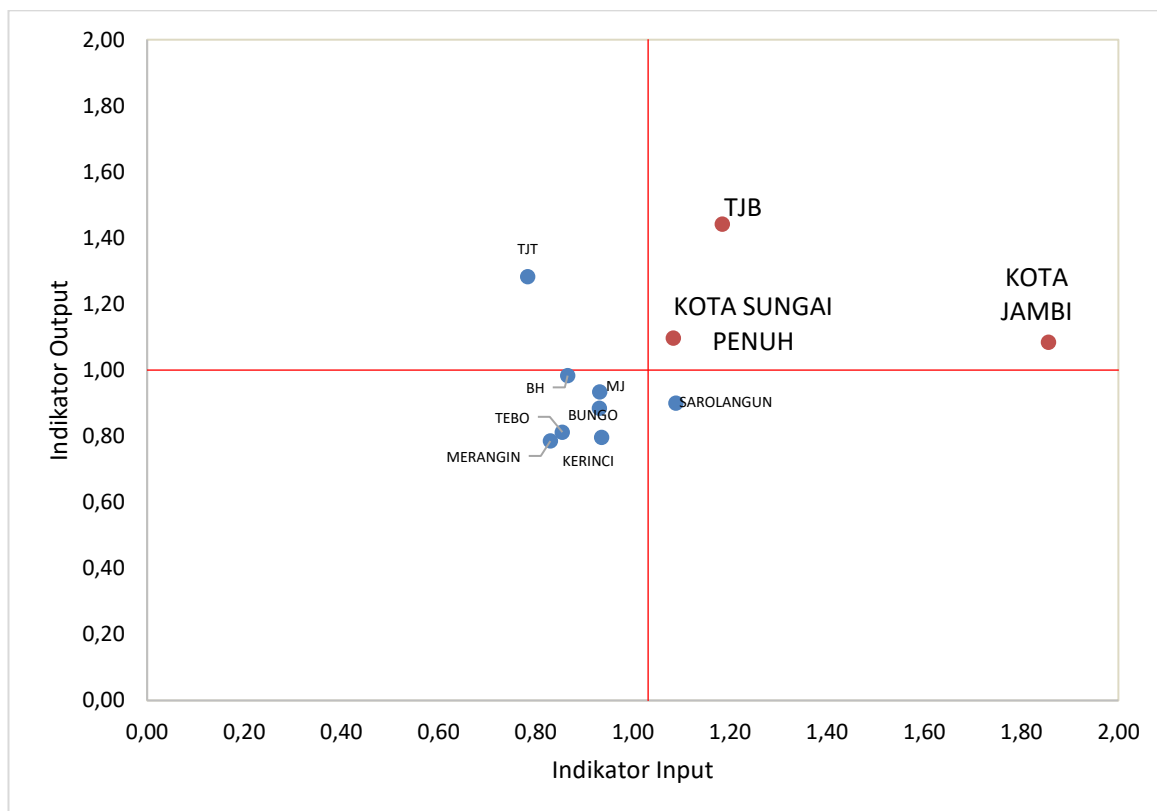
Kuadran I : Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi; dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten/Kota tersebut mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator input dan outputnya.

Kuadran II: Kabupaten Sarolangun. Merupakan daerah yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator inputnya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator outputnya masih dibawah kinerja rata-rata.

Kuadran III: Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Batang Hari; Kabupaten Kerinci; Kabupaten Bungo; Kabupaten Tebo; dan Kabupaten Merangin. Merupakan daerah yang mempunyai karakteristik kinerja indikator input dan

outputnya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata input dan output.

Kuadran IV: Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini mempunyai kinerja indikator outputnya unggul diatas kinerja rata-rata output, namun kinerja indikator inputnya masih rendah.



Gambar 4.16.

Peta Daya Saing Wilayah Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Input-Output

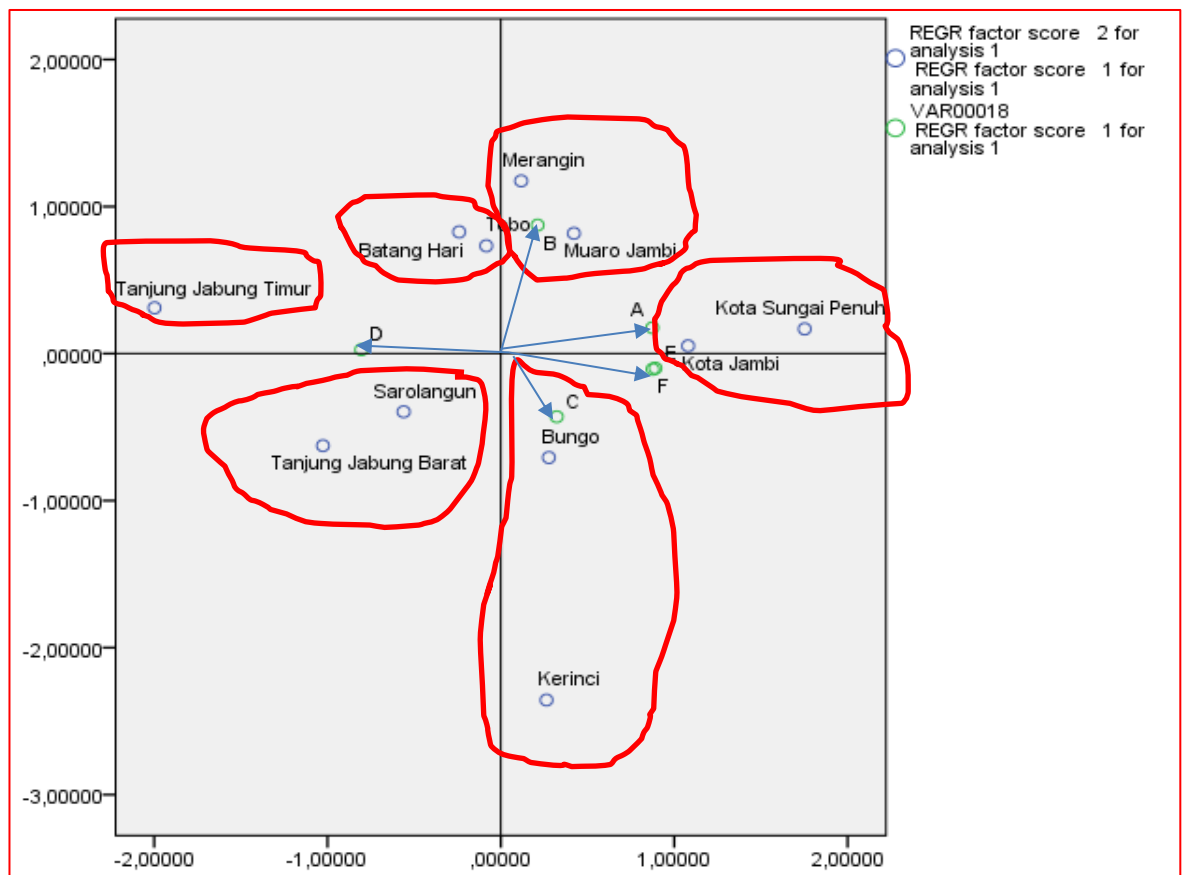
Sumber: Hasil pengolahan tim

4.2. ANALISIS BIPLLOT

Untuk melihat posisi yang lebih spesifik diperlukan metode/alat analisis yang melihat posisi antar-daerah. Alat yang digunakan adalah Biplot. Biplot adalah salah satu upaya menggambarkan data dalam grafik berdimensi dua. Analisis biplot bersifat deskriptif dengan dimensi dua yang dapat menyajikan secara visual segugus objek dan variabel dalam satu grafik. Grafik yang dihasilkan dari Biplot ini merupakan grafik yang berbentuk bidang datar. Dengan penyajian seperti ini, ciri-ciri variabel dan objek pengamatan serta posisi relatif antara objek pengamatan

dengan variabel dapat dianalisis. Informasi yang diberikan oleh Biplot meliputi objek dan variabel.

Posisi antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan Biplot seperti pada Gambar berikut:



Gambar 4.17.

Posisi antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan Biplot

Sumber: Hasil pengolahan Tim

Keterangan :

- A = Angka Melek Kuruf (AMH)
- B = Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- C = Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
- D = Tingkat kemiskinan
- E = Laju Pertumbuhan Ekonomi
- F = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada Gambar di atas menunjukkan bahwa:

(a) Kemiripan relatif antar-objek pengamatan:

Terdapat 6 kelompok obyek yang memiliki kemiripan karakteristik, yaitu:

- Kelompok 1 : Merangin dan Muaro Jambi
Kelompok 2 : Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi
Kelompok 3 : Bungo dan Kerinci
Kelompok 4 : Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat
Kelompok 5 : Batanghari dan Tebo
Kelompok 6 : Tanjung Jabung Timur

(b) Keragaman peubah:

- Peubah yang memiliki **keragaman paling besar** adalah: Tingkat Kemiskinan
- Peubah yang memiliki **keragaman paling kecil** adalah: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

(c) Nilai peubah pada suatu objek:

- **Kota Jambi** dan **Kota Sungai Penuh** mempunyai **indeks performa tertinggi** yaitu: Angka Melek Huruf, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM

4.3. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN

Adanya otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya. Dengan demikian, setiap daerah harus benar-benar mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki agar pembangunan ekonomi daerah tersebut berjalan dengan optimal. Untuk mengidentifikasi potensi daerah, terutama sektor unggulan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat analisis, diantaranya *Location Quotient* (LQ), *Tipologi Klassen*, dan *Shift Share* (SS). Adapun hasil analisis ketiga alat tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.3.1. *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui sektor unggulan di Provinsi Jambi, digunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). LQ merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. Teknik LQ ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dikaji dengan kemampuan yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ dapat menggunakan

satuan jumlah tenaga kerja, atau hasil produksi, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria. Analisis LQ dimaksudkan untuk melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis, sehingga daerah dapat melihat keunggulan sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian di daerah tersebut.

LQ Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan PDRB sektoral yang ada di masing-masing Kabupaten dan Kota terhadap Provinsi Jambi. Adapun pembagian kode untuk masing-masing sektor yang akan dianalisis sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan
- B. Pertambangan & Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- E. Pengadaan Air
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H. Transportasi & Pergudangan
- I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- K. Jasa Keuangan
- L. Real Estate
- M,N Jasa Perusahaan
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T Jasa Lainnya

Tabel 4.15.
Hasil Perhitungan Nilai *Location Quotient* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Klasifikasi	Kerinci	Sarolangun	Muaro Jambi	Merangin	Batanghari	Kota Sungai Penuh	Kota Jambi	Tebo	Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Timur	Bungo
A	2,00	1,10	1,57	1,93	1,54	0,25	0,05	1,91	0,79	0,53	0,75
B	0,06	1,13	0,54	0,10	0,56	0,03	0,19	0,41	1,68	2,43	1,04
C	0,27	0,36	1,52	0,69	1,13	0,06	1,10	0,59	1,79	0,61	0,59
D	0,80	1,05	0,73	1,17	0,95	0,52	3,62	1,36	0,25	0,23	0,81
E	2,90	0,94	0,71	1,35	0,60	2,78	1,97	0,31	0,39	0,38	1,54
F	1,00	1,83	0,77	1,04	0,98	2,01	1,38	1,05	0,52	0,52	1,59
G	1,05	0,62	0,54	1,14	0,81	2,75	2,76	0,91	0,32	0,47	1,30
H	0,84	0,60	1,15	0,58	0,49	1,24	4,10	0,47	0,23	0,30	0,75
I	0,86	1,82	0,60	1,82	0,33	1,13	2,16	0,34	0,39	0,25	2,33
J	1,93	1,02	0,71	1,27	0,81	4,29	1,52	1,07	0,44	0,31	1,28
K	0,48	1,06	0,77	0,68	0,83	2,23	2,66	0,65	0,44	0,28	1,72
L	1,32	0,90	0,84	1,60	0,86	2,05	1,79	1,35	0,41	0,31	1,62
M,N	0,04	0,22	1,15	0,14	0,07	5,76	2,71	0,06	1,03	0,88	0,20
O	1,79	1,08	0,91	1,05	1,16	1,69	2,23	1,01	0,40	0,43	0,89
P	1,39	0,92	0,57	1,17	1,44	2,91	1,44	0,73	0,53	0,75	1,45
Q	1,54	1,14	0,89	1,24	1,24	2,43	2,30	0,83	0,39	0,34	0,57
R,S,T,U	1,64	1,49	1,40	1,41	1,13	2,45	0,81	2,02	0,53	0,24	0,65

Sumber: Hasil Pengolahan Tim

Dari penghitungan LQ tahun 2010 dan 2017 untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diperoleh sektor unggulan (ditunjukkan dengan nilai lebih dari satu).

Untuk Kabupaten Kerinci, ada dua sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan relatif lebih tinggi dari sektor lain, yaitu sektor pertanian, kehutanan & perikanan, dan sektor Pengadaan Air. Selain kedua sektor tersebut, beberapa sektor yang menjadi sektor basis adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan wajar menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kerinci karena sektor ini memberikan kontribusi besar pada struktur ekonomi hampir sepanjang tahun kajian.

Tidak seperti Kabupaten Kerinci, di Kabupaten Sarolangun, sektor yang menjadi sektor basis tidak ada yang nilainya diatas 2, semua sektor basis memiliki nilai diatas 1 dan di bawah 2. Sektor yang memiliki nilai basis tertinggi adalah sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi penyediaan makanan dan minuman, dan sektor jasa lainnya. Kabupaten Muaro Bungo hanya memiliki 4 sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya. Sektor yang terendah nilai LQ nya adalah sektor Pertambangan & Penggalian dan sektor jasa pendidikan.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang memiliki nilai nonbasis yang terendah yaitu untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa perusahaan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Sektor basis tertinggi di Kabupaten Merangin berasal dari sektor pertanian, kehutanan, & perikanan dan sektor penyediaan penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Sektor basis di Kabupaten Batang Hari yaitu terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, sektor jasa pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta sektor jasa lainnya.

Kota Sungai Penuh memiliki sektor basis yang nilainya diatas 5 yaitu sektor jasa perusahaan, sementara sektor lainnya yang termasuk basis adalah sektor informasi dan

komunikasi. Untuk Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur, masih minim sektor yang menjadi sektor basis. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor basis. Fundamental ekonomi yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap perubahan eksternal yang terjadi, misalnya terjadinya fluktuasi harga minyak dunia yang dapat mengakibatkan terguncangnya perekonomian daerah yang bertumpu pada hasil bumi berupa minyak dan gas.

4.3.2. *Tipologi Klassen*

Perhitungan tipologi Klassen didasarkan pada dua hal yaitu proporsi output sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total produk domestik bruto dan pertumbuhan dari masing-masing sektor. Dari perhitungan proporsi dan pertumbuhan tersebut sektor dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Prima (P)
2. Berkembang (B)
3. Potensial (PO)
4. Relatif Terbelakang (RT)

Jika suatu sektor tergolong dalam kelompok prima, tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, artinya daerah tersebut mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sektor tersebut. Tetapi jika suatu sektor masuk dalam kelompok relatif terbelakang tentu pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sektor tersebut dengan menganalisis berbagai faktor yang tersedia. Dari hasil perhitungan nilai *tipologi Klassen* untuk tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Hasil Perhitungan Nilai *Tipologi Klassen* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

Klasifikasi	Kerinci	Sarolangun	Muaro Jambi	Merangin	Batanghari	Sungai Penuh	Kota Jambi	Tebo	Tanjung Jabung Barat	Tanjung Jabung Timur	Bungo
A	PO	PO	PR	PO	PO	PO	RT	PR	PR	PO	PO
B	B	PO	PO	RT	PR	RT	RT	PR	PO	PO	PO
C	B	RT	PR	PR	PO	B	PO	PO	PO	PO	PR
D	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
E	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
F	PR	PO	B	PR	PR	PR	PR	PR	B	B	PR
G	PR	RT	B	PR	PR	PR	PR	PR	B	B	PR
H	B	RT	RT	B	RT	RT	PR	B	B	RT	B
I	B	RT	B	B	B	B	B	B	B	B	B
J	PR	RT	B	B	B	PR	RT	B	B	B	B
K	B	RT	B	B	B	B	PR	B	B	B	B
L	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
M,N	RT	RT	RT	RT	RT	PO	RT	RT	RT	RT	RT
O	PO	RT	B	B	B	B	PO	RT	B	RT	RT
P	RT	RT	RT	RT	RT	PO	RT	RT	RT	RT	RT
Q	B	RT	B	B	B	B	B	B	B	B	B
R,S,T,U	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT

Sumber: Hasil Pengolahan Tim

Secara umum, sebagian besar kabupaten di Provinsi Jambi memiliki keunggulan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk sektor ini, Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tergolong prima. Dapat dipahami untuk beberapa kabupaten dan kota yang tidak termasuk unggul di sektor ini adalah Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain itu, ada catatan penting bagi perekonomian Provinsi Jambi dalam hal daya saing sektoral di masing-masing kabupaten dan kota. Ada tiga sektor yang masih tergolong sektor relatif terbelakang hampir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, sektor real estate, dan sektor jasa pendidikan. Perlu upaya secara menyeluruh dan merata di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi untuk mendorong perkembangan sektor ini agar memiliki kontribusi dan daya saing yang pada akhirnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga sektor yang tergolong sektor prima di Kabupaten Kerinci, yaitu sektor Konstruksi, sektor Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Perkembangan sektor-sektor prima ini dapat dipahami karena di Kabupaten Kerinci dalam 3 tahun terakhir ini, kontribusi sektor tersebut dominan dalam struktur perekonomian daerah. Selain itu, pesatnya pembangunan di Kabupaten Kerinci, baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada perkembangan sektor konstruksi, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, serta pastinya kebutuhan akan informasi dan komunikasi.

Di Kabupaten Sarolangun, meskipun tidak ada sektor yang tergolong pada sektor prima, tetapi ada tiga sektor yang tergolong potensial untuk dikembangkan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, serta sektor konstruksi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan pada perekonomian Kabupaten Sarolangun ini adalah bahwa meskipun terdapat 3 sektor yang potensial dan satu sektor berkembang, akan tetapi hampir seluruh sektor lainnya yang berjumlah 14 sektor masih tergolong sektor relatif tertinggal. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan strategi pengembangan agar Kabupaten Sarolangun tidak tertinggal dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi.

Di Kabupaten Muaro Jambi, hanya ada dua sektor yang tergolong pada sektor prima, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dan sektor industri pengolahan. Sektor lain masih tergolong sektor berkembang dan sektor relatif tertinggal. Sektor potensial hanya ada satu, tetapi sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian sehingga tidak bisa dijadikan tumpuan dalam penentuan daya saing daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten yang tidak memiliki satupun sektor yang dapat digolongkan sebagai sektor prima, dan hanya memiliki 3 sektor potensial, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

4.3.3. *Shift Share (SS)*

Analisis *shift share* menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah perkembangan dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lain. Tujuan analisis *shift share* adalah untuk menentukan produktifitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Hasil analisis *Shift Share* dapat dikelompokkan kedalam beberapa kuadran, yaitu:

- a) Kuadran I menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain, dimana wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah yang *progressive* (maju).
- b) Kuadran II menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang cepat tetapi tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.
- c) Kuadran III menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.

- d) Kuadran IV menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang lambat tetapi sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.
- e) Pada kuadran II dan IV terdapat garis diagonal yang memotong kedua kuadran tersebut. Bagian atas garis diagonal mengindikasikan bahwa suatu wilayah merupakan wilayah yang *progressive*, sedangkan di bawah garis berarti suatu wilayah merupakan wilayah yang pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan hasil perhitungan *Shift Share* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor yang berada di kuadran 1 meliputi:

Kabupaten Kerinci, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Transportasi & Pergudangan.

Kabupaten Sarolangun, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kabupaten Muaro Jambi, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Merangin, yaitu Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Pengadaan Listrik dan Gas

Kabupaten Batang Hari, yaitu Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi

Kabupaten Tebo, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten Bungo, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Transportasi & Pergudangan, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

Kota Jambi, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Konstruksi, Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kota Sungai Penuh, yaitu Informasi dan Komunikasi, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan

Hasil perhitungan *Shift Share* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

4.4. PRODUK UNGGULAN

Produk unggulan daerah Provinsi Jambi sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 599/Kep.Gub/Balitbangda/2013 tentang Penetapan Pengembangan Komoditi Unggulan Lokal Penguatan Sistem Inovasi Daerah yaitu:

1. Karet : Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Bungo Tebo
- Kondisi saat ini :
 - a. Budidaya tanaman karet di Provinsi Jambi sejak dahulu kala (*familier*), sehingga pada waktu tertentu tanaman karet rakyat terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jambi.
 - b. Budidaya ini terus berlanjut dan berkembang sehingga tumbuhlah perusahaan-perusahaan karet skala besar.
 - c. Pangsa pasar cukup menjanjikan, namun tingkat pengolahan di Provinsi Jambi belum dapat memberikan nilai tambah secara optimal karena produk yang dihasilkan dari seluruh kabupaten masih bersifat bahan baku (*raw material*), bahan setengah jadi dan belum disertai dengan tumbuhnya industri ikutan.
2. Sirsak : Kota Sungai Penuh
- Kondisi saat ini :
 - a. Budidaya sirsak pada awalnya belum dikelola secara baik karena pada saat itu pasar masih sangat terbatas, namun akhir-akhir ini pasar telah berkembang sehingga permintaan akan sirsak menjadi menguat.
 - b. Atas dasar itu, kegiatan budidaya tanaman sirsak telah berkembang khususnya di daerah dataran tinggi seperti di Kota Sungai Penuh.

3. Kopi Exelsa
Kondisi saat ini
 - : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - : a. Sejak dahulu kala daerah penghasil kopi di Provinsi Jambi didominasi oleh 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta terbukanya pasar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengkhususkan untuk mengembangkan Kopi Exelsa (pengembangan kopi arabika di daerah gambut).
 - c. Prospek pengembangan kegiatan ini cukup menjanjikan karena lahan memadai dan masyarakat sudah terbiasa dengan budidaya kopi.
4. Casiavera
Kondisi saat ini
 - : Kabupaten Kerinci
 - : a. Sejak dahulu masyarakat Kerinci telah lama membudidayakan tanaman casiavi (kulit/kayu manis) dan hasil dari kegiatan ini telah mempengaruhi pola dan tingkat kehidupan masyarakat Kerinci menjadi lebih berkembang.
 - b. Kendala yang dihadapi dalam menunjang kegiatan budidaya ini adalah semakin terbatasnya lahan dan waktu (periode) panen yang relatif panjang.
 - c. Kendala lain adalah tidak stabilnya harga dan diversifikasi produk olahan masih relatif terbatas
5. Olahan Ikan
Kondisi saat ini
 - : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - : a. Sejalan dengan potensi yang tersedia ada dua kabupaten yang berbatasan dengan laut atau berada di kawasan pantai yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Dalam kegiatan pengolahan ikan kedua kabupaten ini tidak dapat dipisahkan karena saling menunjang.
 - c. Potensi laut dan sungai yang tinggi sangat mendukung kegiatan olahan ikan. Hal ini sangat didukung oleh permintaan pasar domestik dan luar negeri yang tinggi atas produk-produk olahan ikan.

6. Kelapa sawit : Kabupaten Muaro Jambi, Batang Hari,
Kondisi saat ini : a. Budidaya tanaman sawit di Provinsi Jambi berkembang pesat sejak tahun 1990-an.
b. Budidaya ini terus berlanjut dan berkembang baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh perusahaan skala besar.
c. Pangsa pasar cukup menjanjikan, namun tingkat pengolahan di Provinsi Jambi belum dapat memberikan nilai tambah secara optimal karena produk yang dihasilkan dari seluruh kabupaten masih bersifat bahan baku (*raw mterial*) dan bahan setengah jadi (*crude palm oil*) serta belum tumbuh industri ikutannya.
7. Batik : Kota Jambi
Kondisi saat ini : a. Industri Batik di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi telah berkembang sejak dahulu kala, namun dalam pemasaran dan produknya masih sangat terbatas.
b. Peluang pasar yang masih terbatas karena disamping karena saingan dari produk-produk provinsi lain juga dipengaruhi oleh bahan obat-obatan yang relatif mahal.
c. Akibatnya kegiatan ini relatif *stagnant*, namun sejak tahun 1990-an Pemerintah dan Kabupaten terus menggalakkan industri batik sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah yang mampu bersaing di pasar domestik dan pasar global.

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian pembuatan peta potensi investasi Provinsi Jambi Tahun 2017 yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi menunjukkan bahwa potensi Investasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a) Kota Jambi
- Industri Pengolahan seperti remiling karet, batu bata, *crumb rubber*;
 - Industri Manufaktur yaitu Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga serta Alat dapur dari kayu, bambu dan rotan;
 - Usaha perdagangan besar maupun kecil serta reparasi mobil dan sepeda motor;

- Usaha dalam rangka meningkatkan Infrastruktur Dasar seperti Air, Listrik, Telekomunikasi, dan Jalan;
- Usaha Konstruksi baik kecil, menengah dan besar bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil;
- Sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan sentra perdagangan sehingga diperlukan kemudahan dalam akses transportasi dan pergudangan;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum seperti perhotelan, restoran atau rumah makan dan tempat wisata;
- Real estate

b) Kabupaten Muaro Jambi

- Pengembangan Industri Hilir Karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. Industri Hilir Karet antara lain :
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri *Chemical Rubber*
 - ✓ Industri *Crumb Rubber*
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan Dasar Karet dan plastik
- Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
 - ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.
 - ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur

- Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya untuk Industri Manufaktur
- Transportasi Laut berupa pelabuhan yang perlu ditingkatkan sarana dan prasarannya agar lebih memadai dalam proses perdagangan

c) Kabupaten Batang Hari

- Pengembangan Industri Hilir Karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. Industri Hilir Karet antara lain :
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri *Chemical Rubber*
 - ✓ Industri *Crumb Rubber*
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan Dasar Karet dan plastik
 - Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
 - ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.
 - ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur
 - Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya untuk Industri Manufaktur
- d) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit

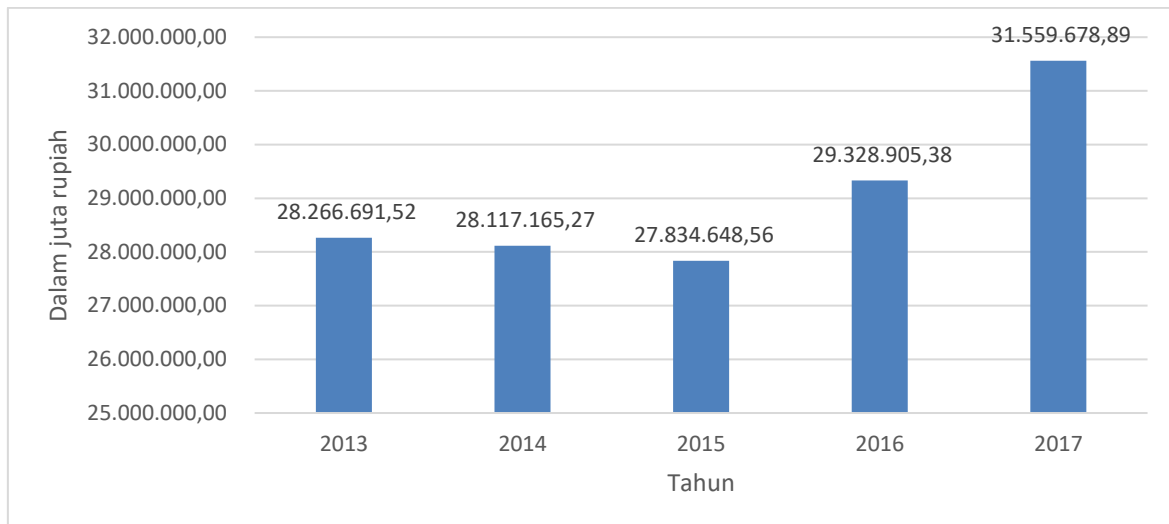
- ✓ Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.
- ✓ Hilirasasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
- ✓ Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur
- Pengembangan Industri Hilir Karet
 - ✓ Industri Ban untuk otomotif
 - ✓ Industri *Chemical Rubber*
 - ✓ Industri *Crumb Rubber*
 - ✓ Industri Barang Jadi untuk Keperluan Industri, Bahan dari Karet untuk keperluan kemiliteran, alasa kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium
 - ✓ Sentra-Sentra Industri Berbahan
- Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman
- Pengembangan Industri Pengolahan Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan dan sejenisnya
- Pengembangan Industri Hulu dan Hilir Migas
 - ✓ Produk Bahan Bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
 - ✓ Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propilena, etilena, benzena, toluena, methanol dan sebagainya.

e) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Pengembangan Industri Hulu dan Hilir Migas
 - ✓ Produk Bahan Bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
 - ✓ Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propilena, etilena, benzena, toluena, methanol dan sebagainya.

4.5. ANALISIS ICOR

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor penting yang mampu menstimulus perekonomian suatu daerah. Investasi tersebut terdiri dari investasi fisik dan juga investasi finansial. Dalam konteks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), aktivitas investasi fisik tercermin dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB memiliki kaitan yang erat dengan adanya aset tetap (*fixed asset*) yang digunakan dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal antara lain bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 diketahui hasil sebagai berikut.

**Gambar 4.18.****Perkembangan PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017**

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa selama rentang waktu 2013-2017 secara umum mengalami tren nilai PMTB yang meningkat. Meskipun demikian, terdapat dua siklus yang membentuk pola nilai PMTB. Pola pertama ialah tren menurun terjadi mulai tahun 2013 dengan nilai PMTB yaitu Rp 28.266.691,52 juta hingga tahun 2015 dengan nilai PMTB yaitu Rp 27.834.648,56 juta. Setelah tahun 2015, pola kedua membentuk tren positif yaitu nilai PMTB yang meningkat menjadi Rp 29.328.905,38 juta pada tahun 2016 dan Rp 31.559.678,89 juta pada tahun 2017. Meningkatnya nilai PMTB Provinsi Jambi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.17.**Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Total PMTB:					
ADHB (miliar rupiah)	32.929,97	34.951,30	35.770,42	39.240,94	42.661,95
ADHK 2010 (miliar rupiah)	28.266,69	28.117,17	27.834,65	29.328,91	31.559,68
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	25,34	24,14	23,07	22,86	22,32
Struktur PMTB:					
Bangunan (%)	64,42	69,03	73,60	72,09	72,65
Non Bangunan (%)	35,58	30,97	26,40	27,91	27,35
Total PMTB (%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan (%):					
Bangunan	12,68	8,90	3,85	3,23	9,20
Non Bangunan	2,96	-17,69	-12,70	11,50	3,39
Pertumbuhan PMTB (%)	9,03	-0,53	-1,00	5,37	7,61

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Pertumbuhan PMTB memiliki variasi pada masing-masing komponen. Hal tersebut ditunjukkan oleh subkomponen bangunan yang memiliki proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, pertumbuhan di sektor bangunan justru cenderung mengalami perlambatan dan memiliki pola yang relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan subkomponen PMTB yang lain.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB memiliki nilai yang relatif berfluktuasi selama periode 2013 hingga 2017. Adanya perubahan yang terjadi pada proporsi nonbangunan terhadap total PMTB tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing subkomponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” subkomponen bangunan pada tahun 2013 ialah sebesar 12,68 persen. Angka tersebut kemudian terus menurun hingga angka 3,23 persen pada tahun 2016 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar 9,20 persen.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhannya, subkomponen non bangunan memiliki pola yang sangat fluktuatif tiap tahun. Pada tahun 2013 hingga 2015, pertumbuhan non bangunan cenderung mengalami perlambatan. Sedangkan pada tahun 2016, nonbangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan hingga 11,50 persen untuk kemudian kembali melambat pada tahun berikutnya hingga 3,39 persen.

Secara umum, selama tahun 2013-2017 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai besaran angka 9,03 persen, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar minus 1 persen.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2013-2017, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah berada di angka 5,48 persen tiap tahun. Jika dilihat secara tahunan, nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ialah 6,84 persen kemudian meningkat menjadi 7,36 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,21 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terus-menerus terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 yaitu masing-masing 4,21 persen; 4,37 persen dan 4,64 persen. Perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) yang mengalami peningkatan secara signifikan serta nilai net ekspor yang mengalami akselerasi yang cukup signifikan (BPS Provinsi Jambi, 2017).

Meskipun mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara umum masih berada posisi yang cukup baik karena tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan tren perubahan yang berfluktuasi tersebut maka dapat digunakan pendekatan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). ICOR dapat menjelaskan peningkatan output sebagai akibat kenaikan kapital. ICOR juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk meningkatkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam konteks ekonomi makro, konsep ICOR sering digunakan untuk melakukan valuasi kinerja investasi suatu daerah. ICOR juga dapat digunakan untuk mengukur nilai investasi yang dibutuhkan agar laju pertumbuhan perekonomian daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kalkulasi nilai ICOR dapat diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan output yang dihasilkan. Karena unit pengukuran kapital memiliki bentuk yang berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Tambahan kapital dapat diperoleh dari adanya investasi. ICOR juga dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Adapun kalkulasi ICOR dapat dilihat berdasar tabel di bawah ini.

Tabel 4.18.
Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB)

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
PMTB (I)	28.266.692	28.117.165	27.834.649	29.328.905	31.559.679	29.021.418
PDRB	111.766.131	119.991.445	125.037.398	131.501.132	136.556.701	124.770.562
Δ PDRB	7.151.049	8.225.314	5.045.953	5.463.734	6.055.574	6.388.325
ICOR	3,95	3,42	5,52	5,37	5,21	4,69

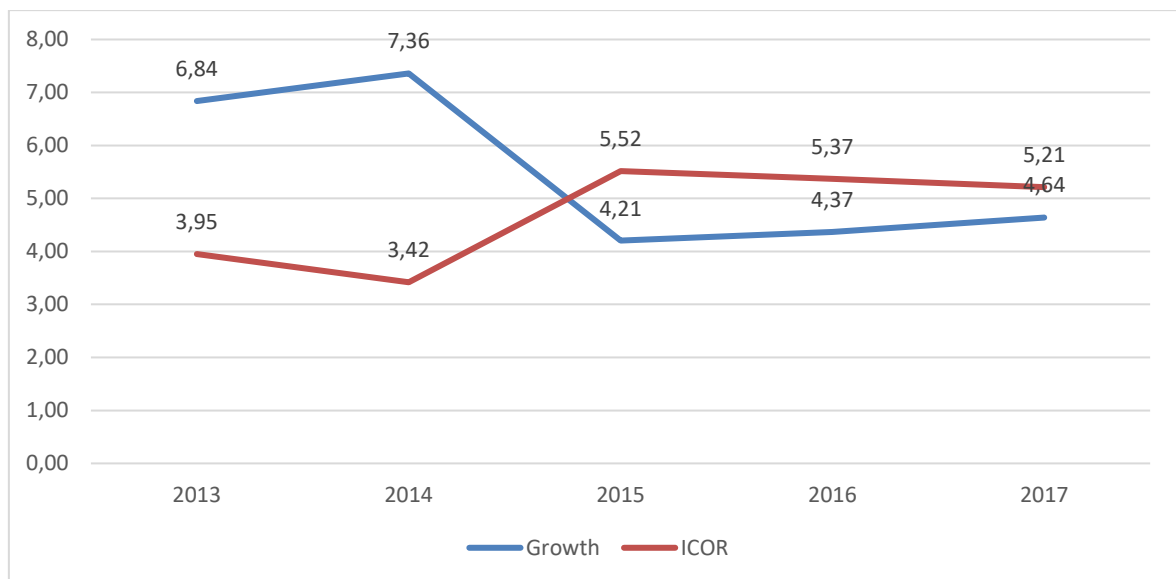
Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai investasi yang tercermin dari PMTB nilainya terus menurun hingga tahun 2015 yaitu mencapai Rp27.834.649 kemudian

meningkat signifikan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing Rp29.328.905 dan Rp31.559.679 sehingga secara umum nilai investasi rata-rata di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 yaitu Rp29.021.418.

Berbeda halnya dengan perkembangan PMTB, nilai PDRB Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai rata-rata tahun 2013-2017 yaitu Rp124.770.562. Hal tersebut didukung oleh nilai pertumbuhan yang selalu positif dengan nilai rata-rata Rp6.388.325 per tahun.

Dengan menggunakan data PMTB dan pertumbuhan PDRB, dapat diketahui nilai ICOR secara tahunan menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan nilai terendah 3,42 dan nilai tertinggi 5,52. Secara umum, nilai ICOR rata-rata selama 2013-2017 ialah 4,69. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk menambah 1 unit output maka dibutuhkan 4,69 tambahan kapital yang tercermin dari investasi.



Gambar 4.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB)

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan gambar di atas juga dapat terlihat bahwa angka ICOR di Provinsi Jambi relatif mengalami penurunan sampai tahun 2014 kemudian meningkat pada tahun 2015 dan menurun lagi hingga tahun 2017. Selama periode tersebut rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,69. Pada tahun 2013 dan 2014 angka ICOR masing-masing adalah 3,95 dan 3,42, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,52, dan kembali

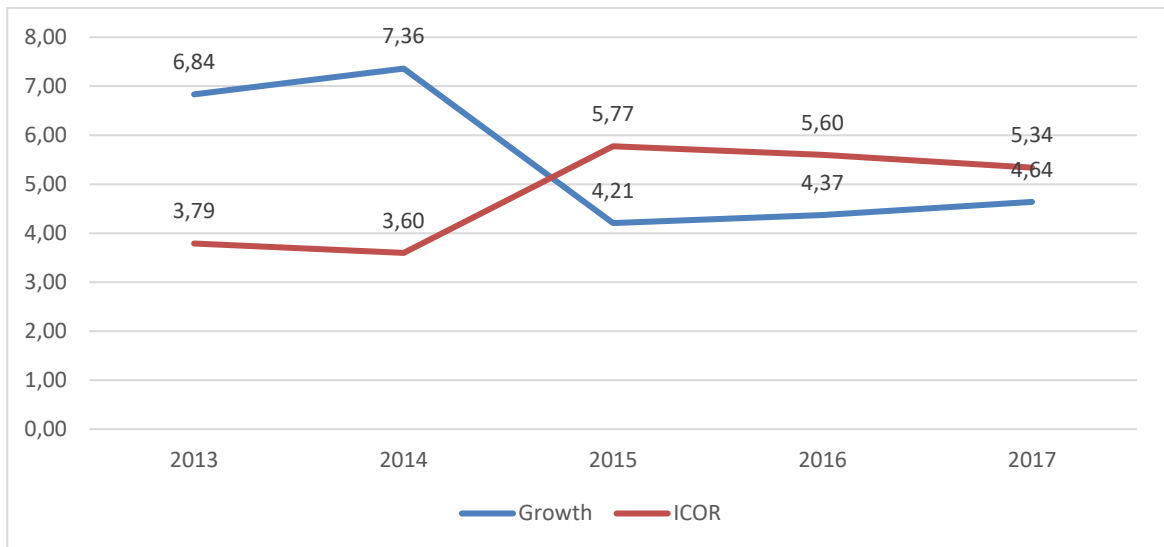
menurun menjadi 5,37 pada tahun 2016 dan 5,21 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Provinsi Jambi dinilai cukup efektif. Dalam hal ini, pada tahun 2013 dan 2014, untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit maka dibutuhkan tambahan investasi berturut-turut sebesar 3,95 satuan dan 3,42 satuan. Sedangkan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan 1 tambahan output ekonomi dibutuhkan tambahan investasi sebesar 5,52 satuan pada tahun 2015 dan 5,37 satuan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, tambahan 5,21 tambahan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak satu satuan. Secara umum, semakin kecil angka ICOR berarti investasi yang dilakukan semakin efisien namun angka ICOR ini menjadi lebih efisien apabila nilainya berkisar antara 3-4 persen.

Tabel 4.19.
Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
PMTB (I)	28.266.692	28.117.165	27.834.649	29.328.905	31.559.679	29.021.418
Inventori	-1.167.645	1.468.417	1.299.006	1.256.629	772.873	725.856
PMTB Total	27.099.047	29.585.582	29.133.654	30.585.535	32.332.552	29.747.274
PDRB	111.766.131	119.991.445	125.037.398	131.501.132	136.556.701	124.770.562
ΔPDRB	7.151.049	8.225.314	5.045.953	5.463.734	6.055.574	6.388.325
ICOR	3,79	3,60	5,77	5,60	5,34	4,82

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Selain menggunakan pendekatan investasi = PMTB, ICOR juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan investasi = PMTB + Perubahan Inventori. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai perubahan inventori berfluktuatif dan memiliki rata-rata Rp725.856. Adanya perubahan inventori yang fluktuatif juga menyebabkan nilai PMTB total juga berfluktuatif namun memiliki tren peningkatan secara umum. Jika dilihat berdasarkan nilai ICOR, diketahui bahwa nilai ICOR meningkat menjadi 4,82 lebih besar dibandingkan ICOR dengan tanpa menggunakan perubahan inventori yaitu 4,69.



Gambar 4.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Di samping itu, angka ICOR yang dihitung dengan pendekatan nilai investasi yang terdiri dari akumulasi nilai PMTB dan perubahan inventori, juga menunjukkan trend kecenderungan yang sama dengan nilai ICOR dengan tanpa perubahan inventori (Lihat gambar di atas). Dengan pendekatan tersebut, rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 4,82. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menambah output sebesar 1 unit dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 4,82 satuan tiap tahun. Secara umum, ICOR Provinsi Jambi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi daerah semakin efisien.

Pada tahun berikutnya, kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik (ditunjukkan dengan laju pertumbuhan nilai tambah yang mengalami penurunan dari 5,77 persen pada tahun 2015 menjadi 5,60 persen pada tahun 2016) menyebabkan kembali membaiknya angka ICOR di Provinsi Jambi. Membaiknya kondisi tersebut juga disebabkan oleh upaya yang cukup keras dari pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan implementasinya program pembangunan disamping kondisi makro ekonomi perekonomian nasional akibat kebijakan pusat termasuk didalamnya adalah paket kebijakan deregulasi dari pemerintah.

Tabel 4.20.
Nilai ICOR di Provinsi Jambi
Menurut Lapangan Usaha Pada Lag 0, Tahun 2013-2017
(Metode Standar dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

Sektor PDRB	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,50	9,62	17,13	14,65	17,06
B, Pertambangan dan Penggalian	24,71	23,49	-404,13	223,27	27,63
C, Industri Pengolahan	27,59	47,33	91,65	95,85	75,03
D, Pengadaan Listrik dan Gas	6505,78	3718,48	6513,18	7721,94	27942,26
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9442,11	4339,42	4364,21	3580,51	6968,93
F, Konstruksi	21,14	42,21	102,16	97,60	48,91
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36,40	34,29	26,47	37,46	59,39
H, Transportasi dan Pergudangan	109,43	106,61	120,52	94,39	129,16
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	435,77	152,89	365,92	306,25	289,15
J, Informasi dan Komunikasi	122,11	116,51	76,43	84,44	106,00
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	96,58	290,15	501,45	104,68	340,07
L, Real Estate	340,21	793,17	401,55	393,23	372,54
M,N, Jasa Perusahaan	1155,77	505,11	374,54	445,83	543,33
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	169,86	60,55	103,59	229,53	281,38
P, Jasa Pendidikan	142,98	621,64	103,76	125,49	178,27
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	328,93	176,61	228,20	329,41	394,91
R,S,T,U, Jasa lainnya	537,27	484,33	286,27	367,27	528,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,79	3,60	5,77	5,60	5,34

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Sementara itu, dengan metode standar nilai ICOR di Provinsi Jambi pada lag 0 tersaji dalam tabel di atas. Pada periode 2013-2017 rata-rata koefisien ICOR Provinsi Jambi menurut sektor perekonomian, pada lag 0 sebesar 4,82. Pada lag ini, didapati bahwa sektor yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Adapun 2 sektor lain yang berada pada 3 sektor dengan nilai ICOR terendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Adapun koefisien ICOR paling besar pada ketiga lag tersebut adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta jasa perusahaan dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 5.608,09. Hal itu mencerminkan bahwa untuk meningkatkan tambahan output sebesar satu juta rupiah pada sektor tersebut di Provinsi Jambi membutuhkan margin kapital sebesar 5.608,09 juta rupiah.

Tabel 4.21.
Kebutuhan Investasi untuk Setiap Target Pertumbuhan Ekonomi
Berdasar RPJMD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Target Pertumbuhan Ekonomi	5,00%	5,5%	5,9%	6,2%
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	143.384.541,3	151.270.691	160.195.662	170.127.792,9
ΔY	6.827.835	7.886.149,77	8.924.970,77	9.932.131,034
Kebutuhan Investasi (Juta Rupiah)	32.910.166,15	38.011.241,9	43.018.359,1	47.872.871,59

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018 (Diolah)

Catatan:

-Koefisien ICOR Standar rata-rata : 4,82

-PDRB ADHK Tahun 2017: 136.556.706 Juta Rupiah

-Target pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2021 diadopsi dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

-Dengan Asumsi Ceteris Paribus

- ΔY : Selisih Nilai Tambah Bruto (NTB) tahun (t) dengan tahun (t-1).

Adapun kebutuhan investasi untuk beberapa tahun mendatang dapat diperkirakan dengan menggunakan angka ICOR dengan metode standar selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 4,82 dan target pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Selama periode 2013-2017, diketahui bahwa nilai ICOR standar di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,82 dengan asumsi laju inflasi tetap dan target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen pada tahun 2018 dengan demikian maka jumlah tambahan investasi yang diperlukan adalah sebesar 32.910.166,15 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen sehingga dibutuhkan tambahan investasi sebesar 38.011.241,9 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% dan 6,2% persen maka dibutuhkan tambahan investasi masing-masing sebesar 43.018.359,1 juta rupiah dan 47.872.871,59 juta rupiah.

Karena anggaran pemerintah tersebut sangatlah terbatas dengan demikian maka diharapkan peran swasta dan rumah tangga dalam penanaman modal di Provinsi Jambi lebih dioptimalkan, demi mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah pusat pada umumnya maupun Pemerintah Provinsi Jambi pada khususnya dirasa perlu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya pihak swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun asing berminat untuk menanamkan modal mereka.

Keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa hal berikut merupakan bahan

pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, Lapangan Usaha dengan koefisien ICOR kecil akan mendapat prioritas untuk melakukan investasi. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi perlu mendapat prioritas investasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengurangi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* tinggi juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat prioritas investasi karena mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.

4.6. ARAH PENGEMBANGAN

Dalam melakukan pengembangan daerah terutama dalam meningkatkan daya saing di Provinsi Jambi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033. Pada RTRW Provinsi Jambi beberapa arahan pengembangan sebagai berikut:

4.6.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Jaringan jalan terdiri atas: jalan arteri; jalan kolektor; jalan bebas hambatan; dan jalan khusus. Jalan arteri meliputi:

a. Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Batas Provinsi Riau/Provinsi Jambi – Merlung;
- ✓ Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi;
- ✓ Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi – Simpang Tuan;
- ✓ Simpang Tuan - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi;

- ✓ Lingkar Barat V Jambi;
- ✓ Batas Kota Jambi KM 15,9 – Mendalo Darat (Simpang Tiga);
- ✓ Simpang Mendalo Darat – Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi (Simpang Rimbo);
- ✓ Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi (Simpang Rimbo) – Simpang Kenali Atas Jambi;
- ✓ Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi - Simpang Pall Sepuluh;
- ✓ Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi – Tempino; dan
- ✓ Tempino – Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi.

b. Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Batas Provinsi Sumatera Barat/Provinsi Jambi – Batas Kabupaten Bungo;
- ✓ Jalan Lintas Sumatera I (Muara Bungo);
- ✓ Jalan Lintas Sumatera II (Muara Bungo);
- ✓ Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin;
- ✓ Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin – Batas Kota Bangko;
- ✓ Jalan Lintas Sumatera I (Bangko);
- ✓ Jalan Lintas Sumatera II (Bangko);
- ✓ Batas Kota Bangko - Batas Kabupaten Sarolangun/ Kabupaten Merangin;
- ✓ Batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun; dan
- ✓ Kabupaten Sarolangun - Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi.

c. Jalan Penghubung (Feeder Road) I Jambi - Bungo yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo);
- ✓ Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo;
- ✓ Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo;
- ✓ Muara Tebo – Sungai Bengkal;
- ✓ Sungai Bengkal – Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo;
- ✓ Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi;
- ✓ Muara Tembesi – Batas Kota Muara Bulian;
- ✓ Jalan Muara Tembesi (Muara Bulian);

- ✓ Jalan Gadjahmada (Muara Bulian);
- ✓ Batas Muara Bulian – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
dan
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Mendalo
Darat.

d. Jalan Lingkar Kota Jambi yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Lingkar Timur I - Lingkar Timur II - Sijenjang; dan
- ✓ Simpang Pall Sepuluh - Simpang Pall Merah - Lingkar Timur I.

e. Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Jalan Soekarno Hatta;
- ✓ Jalan Jend. Sudirman
- ✓ Jalan Jend. Gatot Subroto;
- ✓ Jalan M. Husni Thamrin;
- ✓ Jalan Pangeran Hidayat;
- ✓ Jalan Mayor Marzuki;
- ✓ Jalan Surya Dharma;
- ✓ Jalan M. Yamin;
- ✓ Jalan Sultan Agung;
- ✓ Jalan Sultan Thaha;
- ✓ Jalan Raden Pamuk; dan
- ✓ Jalan Yos Sudarso.

f. Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Jalan Baru Akses Bandara Sultan Thaha Jambi;
- ✓ Jalan Akses Bandara Bungo; dan
- ✓ Jalan Akses Bandara Depati Parbo Kerinci.

g. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan:

1. Jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Simpang Pudak - Suak Kandis - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten
Tanjung Jabung Timur; dan
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Ujung Jabung.

2. Jalan akses Pelabuhan Kuala Tungkal yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Simpang Tuan – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi – Pematang Lumut;
- ✓ Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal;
- ✓ Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal;
- ✓ Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal;
- ✓ Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan
- ✓ Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

3. Jalan akses Pelabuhan Muara Sabak yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Jalan Batanghari II - Simpang Pelabi/Zona V; dan
- ✓ Simpang Pelabi/Zona V - Muara Sabak – Simpang Muara Sabak.

4. Jalan akses Pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi – Talang Duku.

h. Jalan Akses Candi Muaro Jambi yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Simpang Berembang - Simpang Jambi Kecil;
- ✓ Simpang Jambi Kecil - Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru; dan
- ✓ Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru - Candi Muaro Jambi.

Jalan kolektor meliputi:

Jalan Kolektor 1 yang terdiri dari ruas jalan:

1. Jalan Penghubung (Feeder Road) II Muara Tembesi – Kabupaten Sarolangun yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Muara Tembesi – Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
- ✓ Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun – Pauh; dan
- ✓ Pauh – Kota Sarolangun.

2. Jalan Penghubung (Feeder Road) III Bangko – Kota Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Jalan Makalam Bangko;
- ✓ Jalan M. Yamin Bangko;
- ✓ Bangko – Sungai Manau;
- ✓ Sungai Manau – Batas Kabupaten Kerinci;

- ✓ Batas Kabupaten Kerinci – Sanggaran Agung;
- ✓ Sanggaran Agung – Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan RE. Martadinata Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan Kapten Muradi Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan Imam Bonjol Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan Pangeran Diponegoro Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sungai Penuh;
- ✓ Jalan Soekarno Hatta Kota Sungai Penuh;
- ✓ Kota Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat /Provinsi Jambi (Tapan);
- ✓ Kota Sungai Penuh – Siulak Deras; dan
- ✓ Siulak Deras – Batas Sumatera Barat /Provinsi Jambi (Letter W).

3. Jalan Penghubung Antar Pusat Kegiatan yang meliputi ruas jalan:

- ✓ Simpang Tempino - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Panerokan;
- ✓ Simpang Panerokan – Batas Muara Bulian;
- ✓ Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian;
- ✓ Jalan Lingkar Bungo;
- ✓ Simpang Niam - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- ✓ Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Lubuk Kambing – Merlung; dan
- ✓ Talang Duku – Manis Mato - Desa Sogo/Suak Kandis.

Jalan Kolektor 2 yang meliputi:

1. Jalan Penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Muara Sabak – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- ✓ Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kuala Tungkal;
- ✓ Sanggaran Agung – Jujun;
- ✓ Jujun - Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh;
- ✓ Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh - Sungai Penuh;

- ✓ Sungai Saren - Teluk Nilau – Senyerang;
- ✓ Senyerang - Mekarjati/Batas Provinsi Riau;
- ✓ Sengkati Gedang - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- ✓ Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Merlung;
- ✓ Senyerang - Tebing Tinggi - Simpang Kuala Dasal;
- ✓ Simpang Sawmill - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
- ✓ Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo - Simpang Logpon;
- ✓ Simpang Ahok - Simpang Pasar - Bumi Perkemahan;
- ✓ Simpang Jelatang - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun;
- ✓ Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun – Mentawak Baru – Simpang Pematang Kabau;
- ✓ Simpang Kuamang - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo;
- ✓ Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
- ✓ Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo - Simpang Betung Bedarah;
- ✓ Simpang Penerokan - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Sungai Bahar – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
- ✓ Durian Luncuk Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun – Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
- ✓ Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun-Simpang Durian Luncuk;
- ✓ Simpang Pelawan - Batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin;
- ✓ Jangkat - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun;
- ✓ Simpang Pulau Rengas – Jangkat;
- ✓ Simpang Sungai Duren - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
- ✓ Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Sungai Buluh;
- ✓ Simpang Lagan - Simpang Pelabi/Zona V;

- ✓ Pandan Jaya – Muara Sabak;
- ✓ Desa Simpang - Simpang Muara Sabak;
- ✓ Jujun – Lempur;
- ✓ Muara Tebo - Simpang Logpon;
- ✓ Simpang Logpon – Tanjung;
- ✓ Muara Bungo – Peninjau;
- ✓ Peninjau - Tuo Limbur;
- ✓ Tuo Limbur - TKA (Batas Sumbar/Jambi);
- ✓ Peninjau – Junction;
- ✓ Pauh - Lubuk Napal - Sepintun - Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi;
- ✓ Pauh – Simpang Pematang Kabau;
- ✓ Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun – Simpang Pematang Kabau;
- ✓ Simpang Margoyoso- Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun; dan
- ✓ Simpang Merkeh – Air Batu (Akses Geopark Merangin).

2. Jalan Perkotaan yang terdiri dari:

a) Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Jalan Abdul Rahman Saleh;
- ✓ Jalan Ade Irma Suryani;
- ✓ Jalan Dr. Siwabesy;
- ✓ Jalan KH. Abdul Malik Jambi;
- ✓ Jalan Dr. Purwadi;
- ✓ Jalan Dr. Setiabudi;
- ✓ Jalan KH Hasyim Ashari;
- ✓ Jalan Pangeran Diponegoro;
- ✓ Jalan Dr. Soetomo;
- ✓ Jalan HOS Cokroaminoto;
- ✓ Jalan Jend Basuki Rahmat;
- ✓ Jalan H. Agus Salim;
- ✓ Jalan H. Adam Malik;
- ✓ Jalan Gajah Mada;

- ✓ Jalan Hayam Wuruk;
- ✓ Jalan Raden Mattaher;
- ✓ Jalan M. Husni Thamrin;
- ✓ Jalan Slamet Riyadi;
- ✓ Jalan Urip Sumoharjo;
- ✓ Jalan Kapten Pattimura;
- ✓ Jalan Kapten Bakarudin;
- ✓ Jalan Kolonel Abundjani;
- ✓ Jalan Sumantri Brojonegoro;
- ✓ Jalan Kol. Pol. M. Taher;
- ✓ Jalan Djamin Datuk Bagindo;
- ✓ Jalan Brigjen Katamso;
- ✓ Jalan Rangkayo Hitam;
- ✓ Jalan Rangkayo Pingai;
- ✓ Jalan Sentot Alibasyah;
- ✓ Jalan RE. Martadinata;
- ✓ Jalan Jend. Ahmad Yani;
- ✓ Jalan Jend. MT. Haryono;
- ✓ Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi SH;
- ✓ Jalan Yusuf Singedekane; dan
- ✓ Jalan H. A. Manaf.

b) Jalan Perkotaan Sungai Penuh yang terdiri dari ruas jalan:

- ✓ Jalan Sultan Thaha;
- ✓ Jalan Diponegoro; dan
- ✓ Jalan M. Yamin.

Jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan:

Batas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera Selatan – Tempino – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Batas Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan ruas Indralaya (Provinsi Sumatera Selatan) – Betung – Tempino – Kota Jambi – Rengat (Provinsi Riau);

Jalan khusus meliputi ruas jalan:

- ✓ Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung; dan
- ✓ Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Taman Raja/Pelabuhan Dagang (Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

4.6.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Tatanan kepelabuhanan meliputi: pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul; dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama meliputi rencana pengembangan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pelabuhan pengumpul meliputi:

- a) Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b) Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c) Pengembangan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.

Pelabuhan pengumpan meliputi pengembangan Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Alur pelayaran meliputi:

- a. Alur Internasional:
 - 1. Ujung Jabung – Asia Tenggara – Asia Timur; dan
 - 2. Ujung Jabung – Asia Bagian Barat - Eropa Timur.
- b. Alur Nasional:
 - 1. Ujung Jabung – Sumatera Bagian Utara;
 - 2. Ujung Jabung – Pulau Jawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur – Provinsi Maluku; dan
 - 3. Ujung Jabung – Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi.

4.6.3. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:

a. jaringan pipa minyak bumi meliputi:

1. Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kota Jambi;
2. Kabupaten Muaro Jambi – Kota Jambi;
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kota Jambi;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kota Jambi;
5. Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari - Kota Jambi; dan
6. Kota Jambi – Tempino – Provinsi Sumatera Selatan.

b. jaringan pipa gas meliputi:

1. Kota Jambi;
2. Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Batam; dan
3. Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Batam.

Pembangkit tenaga listrik meliputi:

a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:

1. Kabupaten Muaro Jambi;
2. Kabupaten Bungo;
3. Kabupaten Kerinci;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) meliputi:

1. Kabupaten Muaro Jambi;
2. Kabupaten Batang Hari;
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:

1. Kabupaten Kerinci;
2. Kabupaten Merangin; dan
3. Kabupaten Sarolangun.

d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

1. Kabupaten Sarolangun;
2. Kabupaten Bungo;
3. Kabupaten Tebo;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan;
5. Kabupaten Muaro Jambi.

e. Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:

1. Kabupaten Sarolangun;
2. Kabupaten Merangin;
3. Kabupaten Bungo;
4. Kabupaten Tebo;
5. Kabupaten Batang Hari;
6. Kabupaten Kerinci; dan
7. Kota Sungai Penuh.

f. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) meliputi:

1. Kabupaten Muaro Jambi;
2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) meliputi:

1. Kabupaten Kerinci; dan
2. Kabupaten Merangin.

Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:

- (a) pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;

- (b) pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan;
- (c) pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin – Kota Sungai Penuh – Kabupaten Kerinci – Provinsi Sumatera Barat; dan
- (d) pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.6.4. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian meliputi: kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi: pertanian tanaman pangan lahan basah; dan pertanian tanaman pangan lahan kering.

Pertanian tanaman pangan lahan basah yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 3 (tiga) persen dari luas wilayah daratan meliputi:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Kabupaten Batang Hari;
- e. Kabupaten Bungo;
- f. Kabupaten Tebo;
- g. Kabupaten Merangin;
- h. Kabupaten Sarolangun;
- i. Kabupaten Kerinci; dan
- j. Kota Sungai Penuh.

Pertanian tanaman pangan lahan kering yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 6 (enam) persen dari luas wilayah daratan meliputi:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;

- c. Kabupaten Batang Hari;
- d. Kabupaten Bungo;
- e. Kabupaten Tebo;
- f. Kabupaten Merangin;
- g. Kabupaten Sarolangun;
- h. Kabupaten Kerinci; dan
- i. Kota Sungai Penuh.

Kawasan pertanian tanaman pangan yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 4 (empat) persen dari luas wilayah daratan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan hortikultura terdapat di:

- a. Kabupaten Kerinci;
- b. Kabupaten Merangin;
- c. Kabupaten Sarolangun;
- d. Kabupaten Muaro Jambi; dan
- e. Kota Sungai Penuh.

Kawasan perkebunan dengan komoditas berupa kelapa sawit, teh, karet, kopi, kelapa dalam dan kulit kayu manis terdapat di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Kabupaten Batang Hari;
- e. Kabupaten Bungo;
- f. Kabupaten Tebo;
- g. Kabupaten Merangin;
- h. Kabupaten Sarolangun;
- i. Kabupaten Kerinci; dan
- j. Kota Sungai Penuh.

Kawasan peternakan dengan jenis ternak berupa sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam pedaging dan ayam buras terdapat di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Kabupaten Batang Hari;
- e. Kabupaten Bungo;
- f. Kabupaten Tebo;
- g. Kabupaten Merangin;
- h. Kabupaten Sarolangun; dan
- i. Kabupaten Kerinci.

4.6.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
- c. pengolahan perikanan; dan
- d. prasarana perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap sungai meliputi:
 - 1. Kabupaten Batang Hari;
 - 2. Kabupaten Bungo;
 - 3. Kabupaten Merangin;
 - 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 6. Kabupaten Tebo.
- b. kawasan peruntukan perikanan tangkap laut meliputi:
 - 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. kawasan peruntukan perikanan tangkap danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:

- a. peruntukan perikanan budidaya laut meliputi:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. peruntukan perikanan budidaya sungai meliputi:
1. Kabupaten Batang Hari;
 2. Kabupaten Bungo;
 3. Kabupaten Merangin;
 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. Kabupaten Tebo; dan
 7. Kabupaten Sarolangun.
- c. peruntukan perikanan budidaya danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Kawasan peruntukan pengolahan perikanan berupa industri pengolahan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan Prasarana perikanan meliputi:

- a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) meliputi:
1. Kota Jambi;
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 3. Kabupaten Kerinci;
 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 5. Kabupaten Sarolangun;
 6. Kabupaten Batang Hari;
 7. Kabupaten Merangin;
 8. Kabupaten Bungo; dan
 9. Kota Sungai Penuh.
- b. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.6.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- c. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

a. pertambangan batu bara berada di:

1. Kabupaten Sarolangun;
2. Kabupaten Merangin
3. Kabupaten Bungo;
4. Kabupaten Tebo;
5. Kabupaten Muaro Jambi;
6. Kabupaten Batang Hari; dan
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Pertambangan mineral berada di:

1. Kabupaten Kerinci;
2. Kabupaten Sarolangun;
3. Kabupaten Merangin;
4. Kabupaten Bungo;
5. Kabupaten Tebo;
6. Kabupaten Batang Hari;
7. Kabupaten Muaro Jambi;
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berada di:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Kabupaten Muaro Jambi;
- d. Kabupaten Batang Hari;
- e. Kabupaten Sarolangun;

- f. Kabupaten Merangin;
- g. Kabupaten Tebo;
- h. Kabupaten Bungo; dan
- i. Kota Jambi.

Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi berada di;

- a. Kabupaten Kerinci; dan
- b. Kabupaten Merangin.

4.6.7. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri besar;
- b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
- c. kawasan peruntukan industri kecil.

Kawasan peruntukan industri besar meliputi:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:

- a. Kota Jambi;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kabupaten Batang Hari;
- d. Kabupaten Bungo;
- e. Kabupaten Merangin;
- f. Kabupaten Sarolangun; dan
- g. Kabupaten Tebo.

Kawasan peruntukan industri kecil meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota.

4.6.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: kawasan wisata alam; kawasan wisata budaya; dan kawasan wisata buatan. Kawasan wisata alam meliputi:

- a. Taman Nasional Berbak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh;
- c. Taman Nasional Bukit Tigapuluh terdapat di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Taman Nasional Bukit Duabelas terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun;

Taman Hutan Raya meliputi:

1. Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) terdapat di Kabupaten Batang Hari; dan
2. Taman Hutan Raya sekitar tanjung terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan Wisata Geopark meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci; Danau Depati Empat di Kabupaten Merangin; Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci; Air Terjun Telun Berasap di Kabupaten Kerinci; Grao dan Wisata Teluk Wang terdapat di Kabupaten Merangin; dan Danau Sipin terdapat di Kota Jambi.

Kawasan wisata budaya meliputi:

- a. Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Kawasan Cagar Budaya Seberang di Kota Jambi;
- c. Kawasan Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin;
- d. Kawasan Cagar Budaya Batu Bertulis Karang Berahi di Kabupaten Merangin;
- e. Situs Lubuk Ruso di Kabupaten Batang Hari;
- f. Makam Sultan Thaha Syaifuddin di Kabupaten Tebo; dan
- g. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan wisata buatan meliputi:

- a. Landmark Menara Jam Besak Gentala Arasyi di Kota Jambi;

- b. Jembatan Pedestrian Sungai Batanghari di Kota Jambi;
- c. Landmark Danau Sipin di Kota Jambi;
- d. Museum Negeri Jambi di Kota Jambi;
- e. Museum Perjuangan di Kota Jambi; dan
- f. Kebun Binatang Taman Rimba di Kota Jambi.